

**KAJIAN FALSAFAH BUDAYA BUGIS “MALEMPU NA MAPACCING”**

**DALAM MENGELOLA KEUANGAN DESA UNTUK MENEKAN**

**PRAKTIK KECURANGAN (*FRAUD*)**

**(Studi pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) Jurusan Akuntansi pada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**SYAFRIDAYANI**

**10800113097**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafridayani  
Nim : 10800113097  
Tempat/tgl. Lahir : Pattiro Bajo, 05 Mei 1995  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Perumdos UNM Parang Tambung Makassar  
Judul : Kajian Falsafah Budaya Bugis “*Malempu na Mapaccing*”  
Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik  
Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo  
Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Februari 2018

Penyusun,

**Syafridayani**  
**NIM. 10800113097**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi berjudul "**Kajian Falsafah Budaya Bugis "Malempu na Mapaccing" Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)**", yang disusun oleh **Syafridayani, NIM: 10800113097**, Mahasiswa jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2018, bertepatan dengan 14 Jumaidil Awal 1439 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

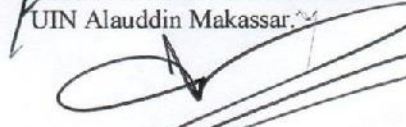
Makassar, 31 Januari 2018  
14 Jumaidil Awal 1439 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag  
Penguji I : Lince Bulutoding, SE., M. Si., Ak  
Penguji II : Dr. Mudassir, SE., MM., Ak  
Pembimbing I : Saiful, SE., M.SA., Akt  
Pembimbing II : Ismawati, SE., M.Si.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UIN Alauddin Makassar.

  
**Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**  
NIP. 19580221 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu alaikum Wr. Wb**

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesabaran, dan kemampuan untuk berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermanfaat.

Skripsi dengan judul **Kajian Falsafah Budaya Bugis “Malempu na Mapaccing” Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan study S1 dan memperoleh gelas sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hambatan yang mudah, banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang harus dilalui. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Syahar dan Ibunda Hj. Darmawati, S.Pd yang

telah mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung, memotivasi dan tak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT demi kebahagiaan dan kesuksesan penulis.

Dan juga kepada Saudaraku yang tercinta Syahridayanti, S.ST., M.Kes dan Sudarmansyah yang juga selalu memberi dorongan dan motivasi, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk melakukan yang terbaik.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., selaku ketua Jurusan Akuntansi, serta bapak Memen Suwandi, SE., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
4. Bapak Saiful Muchlis, SE., M.SA., Ak sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Ismawati, SE., M.M., sebagai dosen pembimbing II yang telah memberi arahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lince Bulutoding, S.E., Ak., CA selaku penasehat akademik

6. Segenap dosen staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
7. Bapak Muhammad Akil, A.Md selaku Kepala Desa Pattiro Bajo dan aparatnya.
8. Teman-teman dan sahabat satu angkatan 2013 Akuntansi UIN Alauddin Makassar kelas Akuntansi B (3,4) dan Teman KKN angk. 55 Kab. Pangkep yang selalu memberi bantuan dan dorongan dan telah menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis
9. Sahabatku tercinta Fita, irma, uli, iji, andin, dea, iin, ica, nunu dan wika yang selalu bersedia menjadi tempat sharing, memberi motivasi, dorongan semangat dan membantu segala hal
10. Kepada Kanda Rahmat, Kak Akbar, Kak Rahim dan Kak ikbar yang telah memberi saran dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan penulisan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb**

Penulis,

**SYAFRIDAYANI**

**NIM: 10800113097**



## DAFTAR ISI

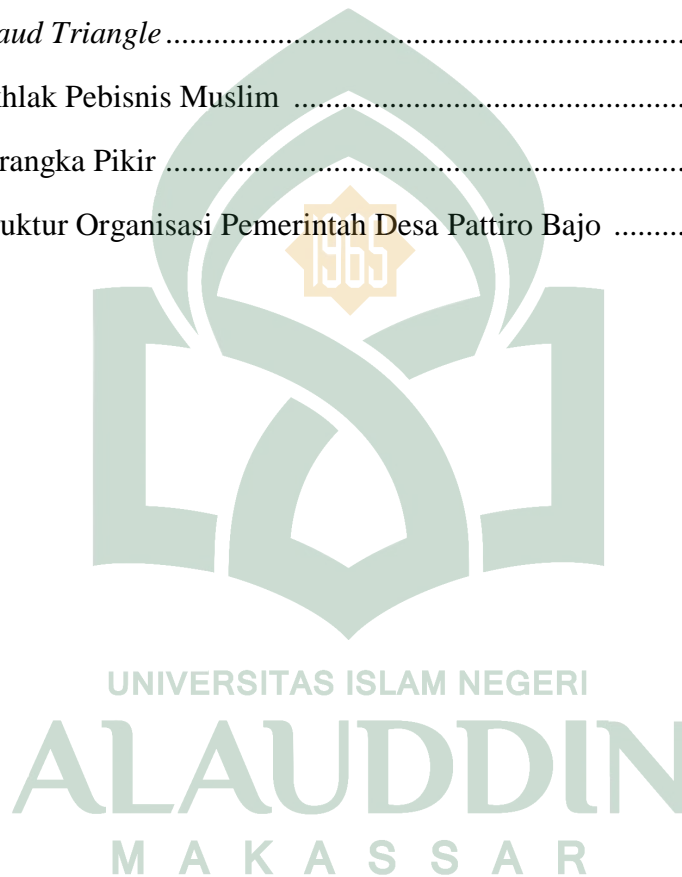
<b>HALMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>15-55</b>
A. Teori Interaksi Simbolis .....	15
B. Pengelolaan Keuangan .....	18
C. Falsafah Bugis " <i>Malempu na Mapaccing</i> " .....	27
D. Laporan Keuangan ( <i>Financial Reporting</i> ) .....	34
E. <i>Fraud</i> (Kecurangan) .....	40
F. Tanggapan aparat terhadap filosofi <i>malempu na mapaccing</i> dalam mengelola keuangan desa .....	47
G. Filosofi <i>malempu na mapaccing</i> dalam mengelola keuangan desa.....	50
H. Rerangka Pikir .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56-65</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Subjek Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data .....	60
E. Metode Pengumpulan Data .....	60
F. Instrumen Penelitian .....	62
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	62
H. Pengujian Keabsahan Data .....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66-97</b>

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	66
1. Sejarah Desa Pattiro Bajo .....	66
2. Keadaan Geografis .....	67
3. Keadaan Demografi .....	68
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	70
5. VISI dan MISI .....	72
6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	73
7. Arah Kebijakan Keuangan Desa .....	73
B. Pembahasan hasil Penelitian .....	78
1. Tanggapan aparat desa terhadap Filosofi <i>malempu na mapaccing</i> dalam mengelola keuangan Desa .....	78
2. Filosofi <i>malempu na mapaccing</i> terhadap pengelolaan keuangan desa dalam menekan praktik kecurangan .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97-99</b>
A. Simpulan .....	98
B. Implikasi Penelitian .....	99
C. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100-104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



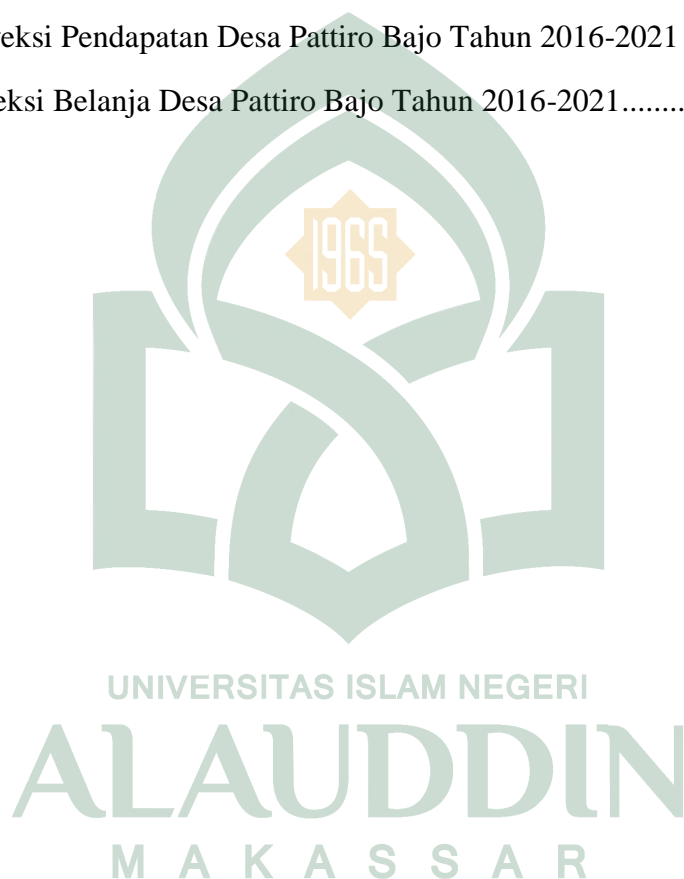
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	19
Gambar 2.2: Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa .....	22
Gambar 2.3: Mekanisme Perencanaan.....	37
Gambar 2.4: <i>Fraud Triangle</i> .....	41
Gambar 2.5: Akhlak Pebisnis Muslim .....	49
Gambar 2.6: Rerangka Pikir .....	53
Gambar 4.7: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pattiro Bajo .....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.2 : Luas Wilayah Desa Pattiro Bajo, Menurut Penggunaannya .....	66
Tabel 4.3 : Potensi, Komoditas, dan Pemasarannya .....	67
Tabel 4.4 : Kondisi Aparat Pemerintah Desa Pattiro Bajo .....	69
Tabel 4.5 : Proyeksi Pendapatan Desa Pattiro Bajo Tahun 2016-2021 .....	72
Tabel 4.6: Proyeksi Belanja Desa Pattiro Bajo Tahun 2016-2021.....	74



## ABSTRAK

NAMA : SYAFRIDAYANI

NIM : 10800113097

JUDUL : Kajian Falsafah Budaya Bugis “*Malempu na Mapaccing*” Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)”

---

Kantor Desa merupakan tempat dimana tindak kecurangan rentan terjadi dikarenakan Anggaran yang begitu banyak dan diserahkan langsung kepada Desa untuk mengelola sendiri keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menekan praktik kecurangan dalam mengelola keuangan berdsarkan Falsafah Bugis “*Malempu na Mapaccing*”. *Malempu na Mapaccing* harus diaplikasikan setiap individu dalam melakukan segala sesuatu terlebih dalam melakukan pengelolaan keuangan suatu instansi pemerintahan terutama Kantor Desa.

Penelitian kualitatif ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan *etnografi* dengan unit analisis Kantor Desa Pattiro Bajo di Kabupaten Bone. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dukungan data sekunder lainnya. Metode analisis data menggunakan empat tahap yaitu: *Data Collection*, *Data Reduction*, *Data Disply*, dan *Verification* dan uji keabsahan data berdasarkan triangulasi dan dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menemukan bahwa aparat Kantor Desa Pattiro Bajo dalam melakukan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif, selain dari itu para apartur juga menanamkan nilai Falsafah “*Malempu na Mapaccing*” dalam beraktivitas. Mencerminkan nilai tersebut berdasar pada tindakan yang mereka lakukan pada saat erinteraksi dengan orang lain. Nilai budaya yang telah diaplikasikan oleh aparatur dapat menghindari perilaku yang tidak etis dalam mengelola keuangan Desa. Dengan demikian Falsafah tersebut telah sejalan dan mewujudkan teori Etika pada setiap interaksi aparat Desa Pattiro Bajo.

Kata Kunci: *Falsafah Budaya Bugis “Malempu na Mapaccing”, Pengelolaan Keuangan, Kecurangan (Fraud).*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk salah satu negara yang kaya akan keindahan aset-asetnya. Terdiri dari berbagai kepingan-kepingan pulau yang berisi petak-petak perkotaan dan rumpun pedesaan. Terjaga dalam rumpun desa-desa, seribu keragaman budaya Indonesia tertanam dan melahirkan berbagai keluhuran dan kearifan lokal yang memikat mata dunia. Merupakan tunas Bangsa Indonesia maka desa-desa memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, maka terlahirlah beberapa kebijakan pemerintah untuk membangun desa.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Berdasarkan ketenrun ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kila, 2017). Desa-desa memiliki hak istimewa terhadap asal-usul mereka dan hak-hak tradisional dalam melakukan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya (Chomariyah *et al*, 2016)

Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan

hanya sekedar normatif. Permendagri No.113 (2014: 2) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah yaitu prinsip *Good Corporate Governance* serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah, 2015).

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah salah satunya sebagai penyedia berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan (Hanifah, 2015). Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah setempat telah mencapai kriteria efektif, namun belum mencapai tingkat efisiensinya karena terdapat beberapa desa yang masih memainkan laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan dari anggaran yang dimiliki oleh setiap desa. Kejadian tersebut dapat dipengaruhi beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang terlalu mengungkung ego. Tindakan demikian merupakan faktor

etika dalam diri eksekutor yang mengarah kepada tindak korupsi atau kecurangan oleh aparat.

Kecurangan *fraud* secara umum meliputi bermacam-macam arti dimana dengan kepandaian manusia, seseorang dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan melalui gambaran yang salah (Albrecht et al 2006 dalam Widilestariningtyas dan Akbar, 2014). Kecurangan *fraud* dilakukan di organisasi, oleh organisasi atau untuk organisasi, tindakan ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal, secara sengaja mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010 dalam Widilestariningtyas dan Akbar, 2014). Rahman (2011) mengemukakan bahwa tindak korupsi kecil (kecurangan) yang berdampak besar merupakan salah satu kerusakan mental yang menjadi penghambat serius bagi tingkat efisiensi dana desa meski sangat jelas dalam islam bahwa korupsi merupakan tindakan terlarang dan diharamkan oleh Allah SWT seperti yang terkandung QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَيَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa/4:29).”

Berdasarkan ayat di atas Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dan segala bentuk transaksi lainnya dengan jalan yang batil yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Oleh karena itu, maka perlu adanya perbaikan mental dan moral bagi para aparat pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan, dimana pada saat ini orang tidak segan lagi melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

Menurut Jalal *et al.* (2016) mengatakan bahwa dalam ideologi Islam pengelolaan keuangan didasarkan pada kebenaran syariah dan segala praktik berbasis syariah dan etika. Secara umum, Islam melarang kebohongan dan menganggapnya sebagai dosa. Kecurangan disebut juga sebagai kebohongan. Secara umum, hal ini tidak sesuai dengan kehendak Allah yaitu tidak menyukai sifat kebohongan. Dalam penelitian yang dilakukan Obida dan Lotfi (2011) mengatakan bahwa seorang manajemen yang melakukan pencatatan harus dipandu oleh iman agar kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan perspektif islam.

Menurut Kartikasari dan Gugus (2010) mengungkapkan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan merupakan *hot issue* pada beberapa periode dan telah memunculkan beberapa kasus skandal terkait dengan pelaporan keuangan akuntansi yang seacara luas diketahui. Kasus temuan dan investigasi LSM LPK-2 Sulawesi Selatan yang mengindikasi lemahnya sistem pengawasan instansi sehingga membuka ruang dan celah bagi kepala desa nakal untuk memainkan dana (ADD) yang dikelolanya. Nampak dari 11 desa yang menjadi fokus pemantauan, ada 10 desa diantaranya diduga kuat melakukan tindak penggunaan ADD secara piktif (Ampa,



2014). Tahun 2016 justru sangat ironis karena dana ratusan juta yang dikucurkan pemerintah pusat melalui program dana desa tidak digunakan sesuai aturan pemdes juga transparansi penggunaan anggaran tidak pernah diperlihatkan oleh Kades setiap ada pertemuan (Ronalyw, 2016).

Tidak jera dengan kasus-kasus sebelumnya, tahun ini masih saja tercium tindak penyelewengan Dana Desa serta kasus-kasus lainnya merupakan contoh penyalahgunaan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi (Cornet *et al.* 2006). Selain dari itu kasus terkait kecurangan dalam mengelola keuangan yang terjadi baru-baru ini pada bulan Agustus, sebanyak 14 kepala desa di Purworejo dilaporkan karena terindikasi melakukan mark up harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan di desa. Mereka melakukan tindak kecurangan laporan keuangan dengan mencatat pembelian barang sebanyak 5 tapi dicatat dalam laporan keuangan sebanyak 8.

Berdasarkan fenomena diatas terkait pengelolaan dana desa yang masih jauh dari efisiensi, maka Pemerintah Desa digugat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel (Chomariyah *et al.*, 2016). Terdapat dua jenis akuntabilitas dalam sektor pemerintahan yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat) (Randa dan Fransiskus, 2014). Rekonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam aktivitas duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah sehingga pengelolaan alokasi dana desa berjalan sesuai dengan tujuan secara efisien.

Terkait misi efisiensi pengelolaan dana desa, Prabawa (2015) dan Asni *et al* (2013) menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan aparat desa merupakan pondasi atau dasar pelaksanaan kegiatan pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam mengelola dananya. Akan tetapi Mongsawad (2010) menyatakan bahwa, kecukupan ekonomi merupakan filosofi tepat untuk menekan jalan tengah sebagai prinsip utama untuk perilaku yang sesuai dengan tingkatan masyarakat. Berlaku untuk strategi pembangunan yang seimbang bagi bangsa. Oleh karena itu, penerapan unsur-unsur budaya dalam pemerintahan patut dijadikan pondasi kegiatan pemerintahan sehingga mencakup beberapa unsur kesatuan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rusdi dan Susanti (2015) bahwa nilai budaya *Siri' na Pacce* diharapkan dapat menekan perilaku kecurangan (korupsi) dengan menanamkan nilai budaya tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh tidak adanya etika kejujuran yang ditanamkan pada individual aparat pemerintah. Tindak kecurangan dapat dicegah dengan cara menciptakan atau menanamkan budaya bugis terkait nilai "*Malempu na Mapaccing*". Said, (2007) mengungkapkan bahwa *Malempu na Mapaccing* atau dalam bahasa Indonesai berarti Kejujuran

*Malempu ianaritu makkebolai ada tonging ri alena naiyya sampoengngi ad tonging bellewe.*

dan kebersihan (Suci) yaitu Niat suci atau bawaan hati yang baik diasosiasikan dengan tameng (pagar) yang dapat menjaga manusia dari serangan sifat-sifat tercela

yang dapat dijadikan sebagai salah satu landasan untuk menciptakan kematangan efisiensi pengelolaan keuangan desa, terutama di Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Falsafah diatas diharapkan dapat menekan praktik keurangan Oleh sebab itu maka pemahaman dan pengaplikasian nilai budaya setempat memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah.

Emosda (2011) mengemukakan bahwa falsafah "*Malempu*" atau kejujuran merupakan suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi untuk menunjukkan siapa dirinya. Menurut Wahyuddin (2012) "*Mapaccing*" atau kebersihan adalah niat atau i'tiqad yang baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Menurut Syahrul (2011) *Mapaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Jadi kedua falsafah tersebut saling berkaitan dimana *malempu na mapaccing* merupakan benteng dalam kehidupan ini karena *mapaccing* merupakan pancaran yang menjelma dalam *malempu*. Adanya I'tiqad yang bersih dari dalam diri maka etika kejujuran juga akan muncul sehingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan tanpa adanya kecurangan didalamnya.

Untuk mengetahui baik buruknya atau berdag tidaknya seseorang dapat dilihat dari simbol atau bahasa yang tersirat saat berkomunikasi dengan sesama yang merupakan wujud dari teori simbolis. Simbol yang secara tidak langsung dilakukan untuk mencerminkan segi kejujurannya dan kebersihan hati mereka dalam melakukan suatu pekerjaan. "*Malempu na Mapaccing*" dapat dibuktikan ketika seseorang telah mendapat kewenangan untuk mengembang suatu amanah (Nasruddin, 2012).

Kandungan Falsafah tersebut dapat menjadi salah satu penunjang tindakan aparat pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa seputar falsafah “*Malempu na Mapaccing*” seyogianya mampu memberikan sebuah kontribusi terhadap tindakan aparat pemerintah. Sebuah harapan masyarakat tentu akan merujuk kepada pola komunikasi yang baik dengan orang lain. Dengan kata lain bahwa masyarakat menaruh sebuah harapan kepada para aparat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Venus, 2003).

Berdasarkan latarbelakang diatas, penelitian ini bermaksud mengetahui nilai kearifan “*malempu na mapaccing*” sebagai pondasi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal dan terpercaya. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“Kajian Falsafah Budaya Bugis “*Malempu na Mapaccing*” Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (*Fraud*) (Studi Pada Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)”**.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana nilai kearifan atau konsep falsafah “*Malempu na Mapaccing*” yaitu nilai kejujuran dan kebersihan dapat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dalam menekan tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau para aparat Desa. Selain itu, penelitian ini juga mengarah pada bagaimana nilai dalam konsep “*Malempu na Mapaccing*” memberikan sumbangsih sebagai pondasi dalam mengelola keuangan untuk mewujudkan keefisienan dan

keandalan pengelolaan keuangan desa. Melihat bahwa saat ini, pembangunan desa dengan pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu suatu langkah kreatif yang bisa menunjang tindakan pengelolaan keuangan tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Pattiro Bajo yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bone. Kantor Desa Pattiro Bajo berada di Kecamatan Sibulue dimana dalam beberapa periode terakhir ini selalu dipimpin oleh orang yang diakui mampu dalam mengembangkan Desanya, akan tetapi Kepala desa sebelumnya tutup usia sehingga di akhir tahun 2015 kemarin kekuasaan tersebut berpindah ke tangan seorang pemimpin yang telah di pilih oleh masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa sistem yang dilakukan dalam membangun dan mengelola setiap kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah juga berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya. Sementara pembangunan dan pengelolaan keuangan menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah pusat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan falsafah Bugis “*Malempu na Mapaccing*” dipercaya mampu mencegah para aparat pemerintah (manajemen) dalam melakukan praktik kecurangan karena dengan adanya kearifan lokal tersebut berkaitan dengan perilaku/etika profesi seseorang sebagai standar global yang akan berdampak pada semakin sedikitnya

pilihan-pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggapan para aparatur dalam menanggapi filosofi “*Malempu na Mapaccing*” terhadap pengelolaan keuangan?
2. Bagaimanakah Filosofi “*Malempu na Mapaccing*” dalam mengelola keuangan desa untuk menekan praktik kecurangan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya, tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan falsafah “*Malempu na Mapaccing*” terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga praktik kecurangan dapat diminimalisir. Tujuan pokok tersebut kemudian dirinci menjadi beberapa sub-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan para aparatur dalam menanggapi filosofi “*Malempu na Mapaccing*” terhadap pengelolaan keuangan
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran Filosofi “*Malempu na Mapaccing*” dalam mengelola keuangan desa untuk menekan praktik kecurangan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini meruakan penelitian yang melihat bagaimana Falsafah kebudayaan “*Malempu na Mapaccing*” terhadap pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat menekan dan mencegah praktik kecurangan yang dapat

mengakibatkan ketimpangan pada efisiensi pengelolaan keuangan desa. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1:**  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nasruddin (2010)	Kearifan Lokal Dalam Pappaseng Bugis	Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan penelitian <i>kualitatif</i> metode deskriptif, ditemukan kearifan lokal yang berupa kejujuran, keteguhan, <i>sirik</i> , etos kerja, gotong-royong dan solidaritas. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipastikan bahwa kearifan lokal dalam pappaseng masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, kearifan lokal sebagai jati diri bangsa sangat perlu direvitalisasi, khususnya bagi generasi muda dalam pencatutan global saat ini dan pada masa datang.
2.	Said Mashadi (2007)	Kearifan lokal Dalam Sastra Bugis Klasik	Kualitatif	Kearifan Lokal diberbagai daerah dieluruh nusantara merupakan kekayaan budaya yang perlu diangkat kepermukaan sebagai bentuk jati diri bangsa. Kearifan lokal yang menjadi fokus utama yaitu: bawaan hati yang baik, <i>Good Governance</i> , demokrasi, motivasi berprestasi, kesetiakawanan sosial, kepatutan, dan penegakan hukum. Berdasarkan fokus tersebut maka disimpulkan bahwa, kearifan lokal dlam kepustakaan bugis masih sangat relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, kearifan lokal sebagai jati diri bangsa perlu direvitalisasi, khususnya bagi generasi muda dalam percaturan global saat dan



				dimasa datang. Dengan semikian, identitas sebagai bangsa baik secara fisik maupun non fisik akan tetap terjaga.
3.	Chomariyah <i>et al</i> (2016)	<i>Perticipation Principle on the 2014 Village Law in Coastal Village</i>	Kualitatif	Melalui pendekatan hukum, Desa Pangkah Kulon menetapkan prioritas pembangunan pada pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup, serta pengurangan kemiskinan. Pemerintah Desa digugat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel. Badan Musyawarah Desa yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan melakukan peran yang serius, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Prinsip partisipasi dapat mendorong aparat desa Pangkah Kulon harus transparan dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa. serta mendirikan sebuah aplikasi digital dapat mencegah penyalahgunaan dana desa.
4.	Rusdi dan Susanti (2015)	Nilai Budaya <i>Siri' Na Pacce</i> dan Perilaku Korupsi	Kualitatif	Nilai budaya siri'na pacce memiliki timbal balik dengan perilaku korupsi. Yang artinya semakin besar nilai budaya siri'na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin kecil perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Sebaliknya, semakin kecil nilai budaya siri'na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin besar perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Selain itu, hasil penelitian juga membuktikan jika nilai budaya siri'na pacce dapat menjadi salah satu faktor untuk menekan perilaku korupsi. Sehingga, diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya siri'na pacce, perilaku

				korupsi dapat dicegah.
5.	Randa dan Fransiskus , (2014)	Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik.	Kualitatif	Ada dua jenis akuntabilitas dalam sektor pemerintahan, yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan akuntabilitas keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat). Rekonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam aktivitas kombongan (duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah).

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini terfokus pada pengaplikasian falsafah budaya Bugis, yaitu “*Malempu na Mapaccing*”. Kemudian ditinjau dengan menggunakan *Teori Interaksi Simbolis*. Teori simbolis dicetus oleh George Herbert Mead pada tahun 1863-1931. Teori ini mengatakan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan simbol berupa bahasa yang digunakan ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Komunikasi yang dilakukan antar sesama untuk menunjukkan suatu makna yang tersirat dari suatu tindakan yang dilakukan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai aturan dan nilai dari Budaya Bugis menunjukkan suatu makna yang tersirat bahwa, laporan keuangan tersebut dicatat dan dielola dengan sebaik mungkin.

Penelitian ini mampu menjadi pegangan bagi pengembangan teori-teori dalam mengelola keuangan desa. Melalui unsur Falsafah “*Malempu na Mapaccing*”

diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih yang lebih kreatif dalam pengembangan teori terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dengan teori simboli sebagai wujud pengaplikasian suatu makna yang tersirat atas tindakan yang dilakukan oleh para aparatur, sehingga menjadi sebuah referensi maupun rujukan terhadap penelitian dan pengembangan studi pada bidang sektor publik.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan acuan bagi para aparat pemerintah atau para pengelola keuangan yang bekerja di Kantor Desa Pattiro Bajo, bahwa perlunya penerapan Falsafah budaya Bugis dalam menekan tindak kecurangan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Jadi, manajemen tidak hanya memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan baik, tetapi juga diperlukan penerapan etika yang sesuai dengan syariat islam yaitu "*Malempu na Mapaccing*" dalam menyongsong perubahan maupun dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah untuk menyadari betapa pentingnya penerapan nilai-nilai leluhur sebagai pondasi dalam segala aspek kegiatan pemerintah terlebih dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Interaksi Simbolis**

Teori interaksi simbolik bermula dari interaksionisme simbolik yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead pada tahun 1863-1931 yakni sebuah perspektif sosiologi yang dikembangkan pada kisaran pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoretis yaitu aliran Chicago yang diprakarsai oleh Helbert Blumer, aliran Iowa yang diprakarsai oleh Manford Khun, dan aliran Indiana yang diprakarsai oleh Sheldon Stryker.

Fitraza (2008), Mead tertarik mengkaji interaksi sosial, dimana dua ata lebih individu berpotensi mengeluarkan simbol yang bermakna. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan oleh orang lain. Teori ini memberikan pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia, dan banyak memberikan kontribusi intelektual.

Helbert Mead menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan kejadian. Pemaknaan ini diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia ketika berkomunikasi dengan pihak lain yakni dalam konteks komunikasi antar pribadi atau

komunikasi interpersonal atau *self-talk* atau dalam ranah pemikiran pribadi mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia untuk mengembangkan *sense of self* dan untuk berinteraksi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat (Ahmadi, 2005).

Siregar (2011), Helbert Blumer mendefinisikan interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Tiga asumsi dari teori ini:

1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka.
2. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia
3. Makna modifikasi melalui interpretasi.

Menurut Pakar Komunikasi (2017:3) Scott Plunkett mendefinisikan interaksi simbolik sebagai cara belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita. Teori Interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain (Wikipedia, 2017:1).

Menurut Wikipedia (2017:3) La Rossan mengasumsikan teori ini adalah sebagai berikut:

1. Interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep diri seseorang.
2. Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku seseorang.

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (*Mind*) mengenai diri (*Self*), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (*Society*) dimana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) dalam Siregar (2011), makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentuk makna, selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.

Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

1. Pikiran (*Mind*) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain,
2. Diri (*Self*) adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (*The-Self*) dan dunia luarnya
3. Masyarakat (*Society*) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial ditentukan melalui jenis-jenis

interaksi sosial. Teori mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu.

Teori interaksi simbolis dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menuntut setiap individu mesti proaktif, refleksif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang unik, rumit, dan sulit diinterpretasikan. Teori interaksi simbolik menekankan dua hal. *Pertama*, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. *Kedua*, interaksi dalam masyarakat mewujudkan dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis (Ahmadi, 2005).

## **B. Pengelolaan Keuangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 65, 2008), Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut KBBI (KBBI:1767, 2008) Keuangan diartikan segala sesuatu yang bertalian dengan uang, seluk beluk uang, urusan uang dan keadaan uang. Keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan



modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama pemerintahan.

Menurut Shaferi dan Handayani (2014) Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien, sehingga perusahaan mendapatkan laba dan dapat bertahan di masa mendatang. Untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, dapat digunakan neraca (*balance sheet*), laporan laba rugi dan laporan aliran kas (*cas flow statements*). Neraca atau juga yang dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih, adalah bentuk laporan yang menjelaskan nilai semua asset yang kita miliki (sisa aktiva) dan nilai semua kewajiban yang kita miliki dan besarnya modal sendiri (sisi pasiva). Dari neraca tersebut, terlihat beberapa besar nilai yang berhasil ditambahkan dari modal yang disetor. Sementara itu, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja pengakumulasian laba dalam kurun waktu tertentu (Yulia, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (PERMENDAGRI, 2014) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan

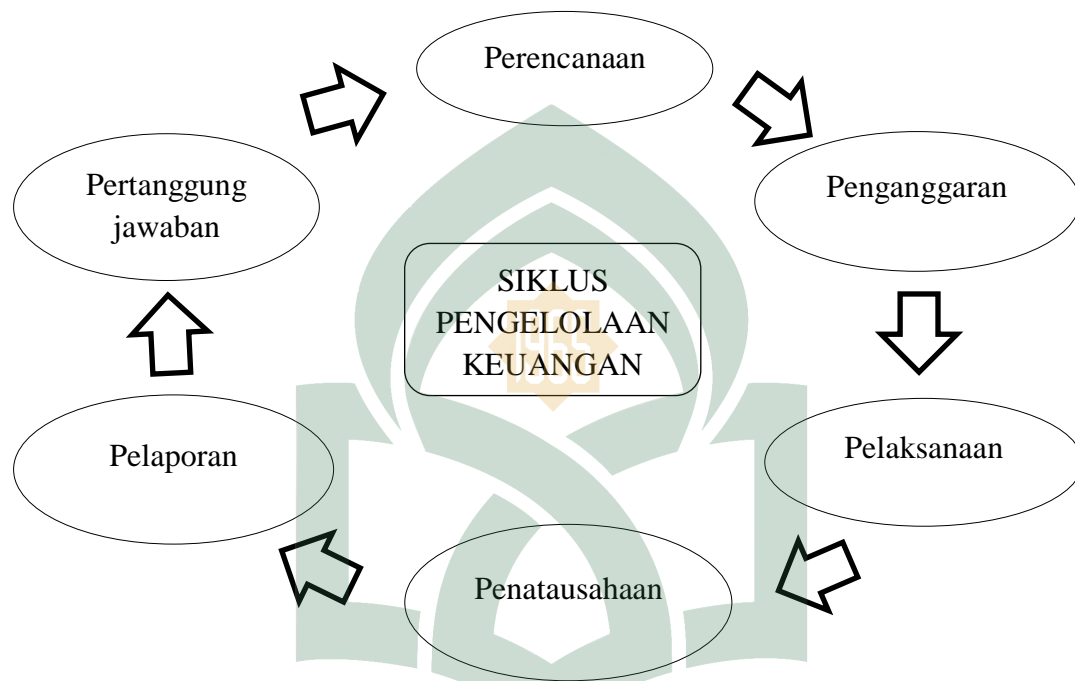
desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan:

- a. Mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana yang tidak diinginkan di kemudian hari dalam pelaksanaan sebuah proyek perencanaan.
- c. Mencapai target perencanaan dengan lebih efisien karena adanya ketersediaan dana yang cukup serta telah direncanakan dan dapat dialokasikan dengan maksimal.
- d. Menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada dengan cara pemisahan tiap-tiap otoritas dalam pengelolaan keuangan. Contohnya: Pemisahan bagian pencatatan keuangan dengan bagian pengawasan keuangan.
- e. Memperlancar segala kegiatan yang terjadi di instansi / organisasi karena adanya transparansi terhadap keuangan yang dimiliki.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat karena didukung oleh siklus keuangan yang berjalan dengan baik dan terencana.

Menurut Mulyawan (2017) Pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut gambaran rincian proses siklus Pengelolaan Keuangan Desa:

**Gambar 2.1:**  
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya di desa, struktur APB Desa, Laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya. (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2015:34).

## **1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) mengemukakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Menurut Emirzon (2011) Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
- b. mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

- e. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

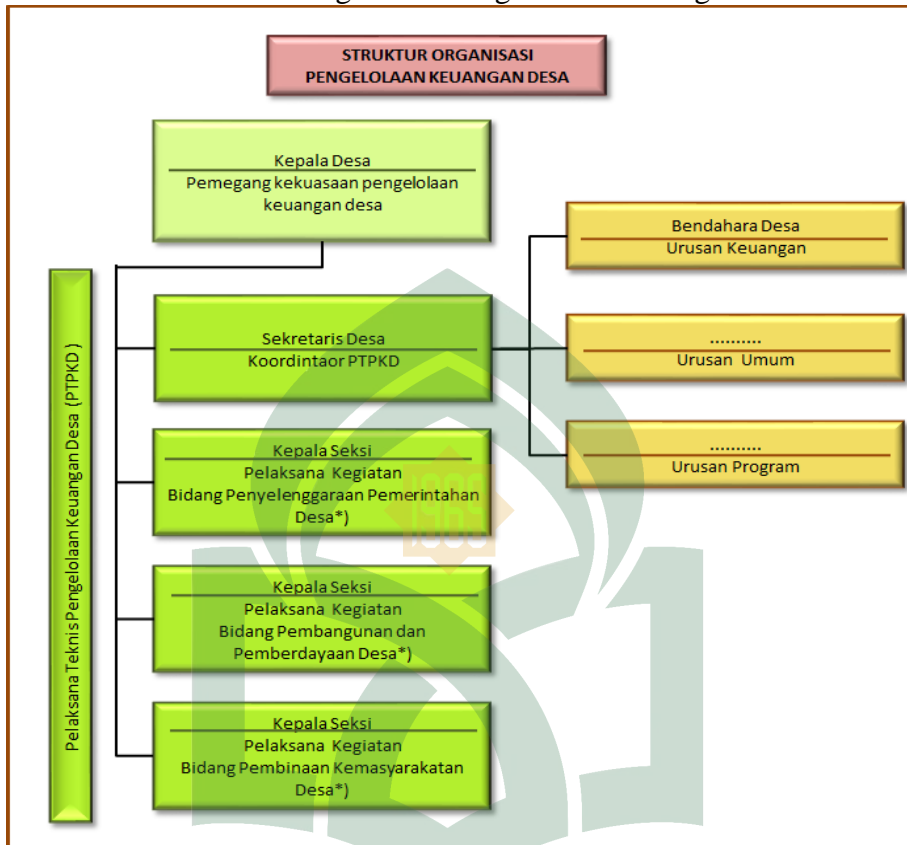
Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

## **2. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa**

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (BPKP, 2015). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Permendagri (2015)

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

#### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).



Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**c. Kepala Seksi**

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**d. Bendahara Desa**

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pempdapatan

desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### **C. Falsafah Bugis “*Malempu na Mapaccing*”**

Falsafah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti anggapan, gagasan dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang masyarakat, pandangan hidup. Menurut KBBI budaya adalah pikiran, adat istiadat. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat atau keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Filsafat kebudayaan ialah menyelidiki hakikat kebudayaan, memahaminya berdasarkan sebab-sebab dan kondisi-kondisinya yang esensial Kebudayaan.

Kearifan lokal menurut Antariksa (2009) adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu lama dan melembaga. Kearifan lokal

juga didefinisikan sebagai sebuah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Nilai kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Suku bugis adalah salah satu suku yang mendiami jazirah Sulawesi dan Kabupaten Bone sering dianggap sebagai pusat dari peradaban suku Bugis. Kabupaten Bone terletak sekitar 174 km sebelah timur kota Makassar dengan luas wilayah 4.559 km<sup>2</sup>. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dan berbagai nilai yang ada (*pappaseng*). Masyarakat Bugis sama halnya dengan kepatuhan akan adat istiadatnya yang mana tetap mengacu pada *pappaseng* (petuah) orang-orang terdahulunya.

Ungkapan pepatah Bugis yaitu:

*“Duami kuala sappo, Unganna panasae na belona kanukue (Duami riyala sappo lempu’e sibawa paccing’e”*

Artinya: Hanya dua yang kujadikan pagar, bunga nangka (kejujuran) dan penghias kuku (Kesucian/kebersihan). Bunga nangka dalam bahasa Bugis disebut “Lempu” sedangkan penghias kuku yang dikenal oleh masyarakat Bugis adalah tanaman pacar kuku yang dalam bahasa Bugis disebut “*Pacci*” yang kemudian berasosiasi pula dengan kata “*Paccing*” yang berarti bersih atau suci (Rizal, 2015). Pepatah bugis tersebut menjadi prinsip utama berdagang oleh sebagian besar masyarakat bugis sebagai pesan leluhur untuk dibudayakan dan diterapkan dalam berdagang.

Pagar diri setiap orang sebenarnya sudah cukup bila ia memiliki keduanya, yaitu ia dapat memelihara sifat jujur dan perbuatannya bersih dari noda dan

pelanggaran. Dalam bahasa Bugis, bunga angka disebut *lemphu* yang berasosiasi dengan kata jujur, sedangkan hiasan kuku dalam bahasa Bugis disebut *pacci* yang kalau ditulis dalam aksara Lontara' dapat dibaca *paccing* yang berarti suci atau bersih.

### 1. Malempu (Kejujuran)

*Malempu ianaritu makkebolai ada tonging ri alena naiyya sampoenngi ad tonging bellewe.*

Artinya:

Jujur itu adalah terdapatnya perkataan yang benar dalam diri seseorang dan yang merusak kejujuran adalah perkataan dusta atau sifat yang suka berkata bohong.

Bahkan ada ungkapan yang lain tentang pengharapan yang tinggi atas berlansungnya suasana kejujuran dalam suatu masyarakat. Kejujuran adalah suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi menunjukkan siapa` dirinya (Emosda, 2011) sesuai yang disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebenaranmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Rasulullah SAW memiliki perhatian yang begitu besar terhadap kejujuran, sebagaimana beliau bersabda yang artinya:

“Jauhi dusta karena dusta akan membawa kepada dosa dan dosa akan membawa ke neraka. Biasakanlah berkata jujur karena jujur akan membawa ke surga” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Alimuddin dan Iwan (2011) mengatakan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis kejujuran yang dapat digunakan di dalam berusaha agar terjadi kemaslahatan baik pada diri pedagang maupun lingkungannya, yaitu:

- a) Kejujuran berniat.
- b) Kejujuran lahiriah.
- c) Kejujuran batiniah.

Kejujuran dalam berniat merupakan komitmen kepada Sang Pencipta untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah dicita-citakan. Seorang pengusaha yang telah berniat untuk menetapkan komposisi penggunaan bahan atas produk yang akan dihasilkannya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi komposisi yang telah ditetapkan. Niat ini merupakan salah satu pembeda dalam berusaha (berbisnis) antara pengusaha konvensional dengan pengusaha muslim. Niat dalam pandangan Islam merupakan janji, bukan hanya kepada konsumen tetapi yang lebih penting kepada Sang Pemberi Rezeki. Niat ini juga menyadarkan kepada yang melakukannya bahwa segala aktivitasnya bukan hanya untuk mengejar kekayaan dunia (*profan*) tetapi juga kemaslahatan di akhirat kelak.

Berprilaku jujur berarti menjadi orang yang berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebaliknya jika berperilaku menipu dan berbohong maka hanya akan meresahkan dan tidak akan dipilih oleh banyak orang, menjadi sampah masyarakat karena meresahkan mereka, menimbulkan fitnah dan bahkan menciptakan permusuhan.

## **2. Mapaccing (Kesucian/Kebersihan)**

Menurut Syahrul (2011) menjelaskan bahwa *Mappacci* adalah kata kerja dari “*Mapaccing*” yang berarti bersih atau suci. Di beberapa daerah Bugis, *Mappacci* dikenal dengan sebutan *Mappepaccing*. *Mapaccing* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Dalam bahasa Bugis, *Ati mapaccing* (bawaan hati yang baik) berarti *nia’ madeceng* (niat baik), *nawa-nawa madeceng* (niat atau pikiran yang baik). Kata bawaan hati, niat atau i’tikad baik juga berarti ikhlas, baik hati, bersih atau angan-angan dan pikiran yang baik. Menurut Wahyuddin (2012) berpendapat bahwa bawaan hati yang baik atau kebersihan hati (*Mapaccing*) berarti niat atau I’tiqad yang baik dalam diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Tindakan bawaan hati yang baik dari seseorang di mulai dari suatu niat atau i’tikad yang baik (*nia mapaccing*), yaitu suatu niat yang baik dan ikhlas untuk melakukan sesuatu demi tegaknya harkat dan martabat manusia. Bawaan hati yang baik mengandung 3 makna, yaitu:

- e. Menyucikan hati
- f. Bermaksud Lurus, dan

g. Mengatur emosi-emosi

*Pertama*, manusia menyucikan dan memurnikan hatinya dari segala nafsu-nafsu kotor, dengki, iri hati dan kepalsuan-kepalsuan. Niat suci atau bawaan hati yang baik diasosiasikan dengan tameng (pagar) yang dapat menjaga manusia dari serangan sifat-sifat tercela (Said, 2007). *Kedua*, manusia sanggup untuk mengejar apa yang memang direncanakannya tanpa dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Lontara' Bugis menyebutkan:

*“Ututuiwi anngolona atimu, aja' muammanasaianngi ri ja'e padammu rupa tau'e nasaba mattentui iko matti narewaki ja'na apa' riturungenngi ritu gau' madecenngi riati maja'e nade'sa nariturungeng ati lettu' rimonri ja'na”*

Artinya:

“(Jagalah arah hatimu, jangan menghajatkan yang buruk kepada sesama manusia, sebab pasti engkau kelak akan menerima akibatnya, karena perbuatan baik terpengaruh oleh perbuatan buruk. Orang yang beritikad buruk akibatnya akan sampai pada keturunannya keburukan itu)”.

Kutipan lontara diatas menitikberatkan pentingnya seorang individu untuk memelihara arah hatinaya. Manusia dituntut untuk selalu berniat baik kepada sesama. Memelihara hati untuk selalu berhati berih kepada sesama manusia akan menuntun individu tersebut memetik buah kebaikan. Sebaliknya, individu yang berhati kotor, yaitu menghendaki eburukan terhadap sesama manusia, justru akan menerima akibat buruknya. Karena itu, tidak ada alasan bagi seorang individu untuk memikirkan hal-hal buruk terhadap sesama manusia. Dengan kata lain, agar setiap individudapat memetik keberuntungan atau keberhasilan dalam hidup sesuai dengan cita-citanya, ia terlebih dahulu harus memelihara hatinya dari penyimpangan-penyimpangan. Jika

menginginkan orang berbuat baik kepadanya, ia harus terlebih dahulu berniat dan berbuat baik kepada orang lain (Said, 2007).

*Ketiga*, manusia tidak membiarkan dirinya digerakkan oleh nafsu-nafsu, emosi-emosi, perasaan-perasaan, melainkan diatur suatu pedoman (*toddo*), yang memungkinkannya untuk menegakkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat suci, karena tanpa niat yang suci atau bersih tindakan seseorang tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Seseorang yang mempunyai bawaan hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar karena penilaiannya jernih (Said, 2007). Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman: 17

يَبْنَئِ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ



Terjemahnya:

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (Manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (Oleh Allah). (Q.S. Luqman: 17)

Berdasarkan ayat diatas Allah senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk menegakkan shalat yang merupakan pokok dari segala macam ibadah dan merupakan tiang agama dalam islam. Menyuruh kebaikan termasuk perbuatan yang mendukung tegaknya suatu agama serta menjauhi perbuatan mungkar.

Menurut Mannahao (2010) mengatakan bahwa bagi masyarakat Bugis kejujuran dan kesucian merupakan benteng dalam kehidupan ini karena kesucian adalah pancaran kalbu yang menjelma dalam kejujuran. Sebagai seseorang yang



berdarah Bugis asli mengartikan bahwa, segala macam perbuatan harus dimulai dengan niat yang suci karena tanpa niat suci (baik), tindakan manusia tidak mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa (Rizal, 2015). Seseorang yang mempunyai hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang benar karena penilaiannya jernih.

Nilai-nilai motivatif yang terkandung dalam falsafah hidup tersebut, pada dasarnya telah dikenal oleh manusia sejak masa lampau. Tak terkecuali orang Bugis, dimasa lampau mereka telah memiliki sederet orang bijak yang mengajarkan tentang falsafah hidup sehingga meninggalkan sikap *panggadereng* yang tinggi pada suku ini. Makna *panggadereng* dalam konsep ini ialah keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seorang harus bertingkah laku serta pandangan hidup.

#### **D. Laporan Keuangan**

Laporan (KBBI) adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Dalam sektor publik (instansi pemerintahan) Laporan keuangan dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam PP tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan kewajiban suatu pemerinth

pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan kewajiban selama suatu periode tertentu (Firdaus, 2016).

Menurut Dewa (2015), mengemukakan bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan. Laporan Keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemerintah pusat. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Minarti, 2012).

Tujuan khusus Laporan Keuangan menurut APB *Statement* No. 4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)

Pada PSAK 1 paragraf 15 Menjelaskan bahwa:

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian laporan keuangan secara wajar yang mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, penghasilan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Firdaus (2016) mengemukakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi sebagai berikut:
  - a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
  - b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
2. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non-lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

3. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan (pembiayaan) untuk satu periode waktu tertentu. Pelaporan arus kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to The Financial Statement*) merupakan bagian integral (satu kesatuan) yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan seperti yang tersebut diatas dapat dikatakan sebagai “laporan-laporan untuk tujuan umum”.

Menurut Hanifah (2015) karena keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya dimiliki pemerintahan desa, pemerintah kemudian hanya menetapkan laporan wajib yang sangatlah sederhana karena hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran (APBDesa) yang kemudian turut serta dilampirkan: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan; (c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran; (d) Buku Kas Harian Pembantu; (e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD.

Menurut Minarti (2012), Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasa digunakan adalah tahunan yang mulai 1 Januari dan berakhir dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Periode seperti ini disebut periode tahun kalender. Selain tahun kalender, periode akuntansi bisa juga dimulai dari tanggal selain tanggal 1 Januari. Istilah periode akuntansi sering juga disebut dengan istilah tahun buku. Walaupun periode akuntansi (tahun buku) yang digunakan itu adalah tahunan, manajemen masih dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek misalnya bulanan, triwulan atau kuartal. Laporan keuangan yang dibuat untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun disebut laporan interim.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9 (Revisi 2015), dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda begitupun dengan instansi pemerintahan.

### **1. Rencana Anggaran Biaya**

Perencanaan penyelenggaraan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 6 Permendagri No. 66 Tahun 2007). Rencana Anggaran Biaya di butuhkan dalam rencana pembangunan desa, dimana dalam pembangunan desa tersebut terdapat

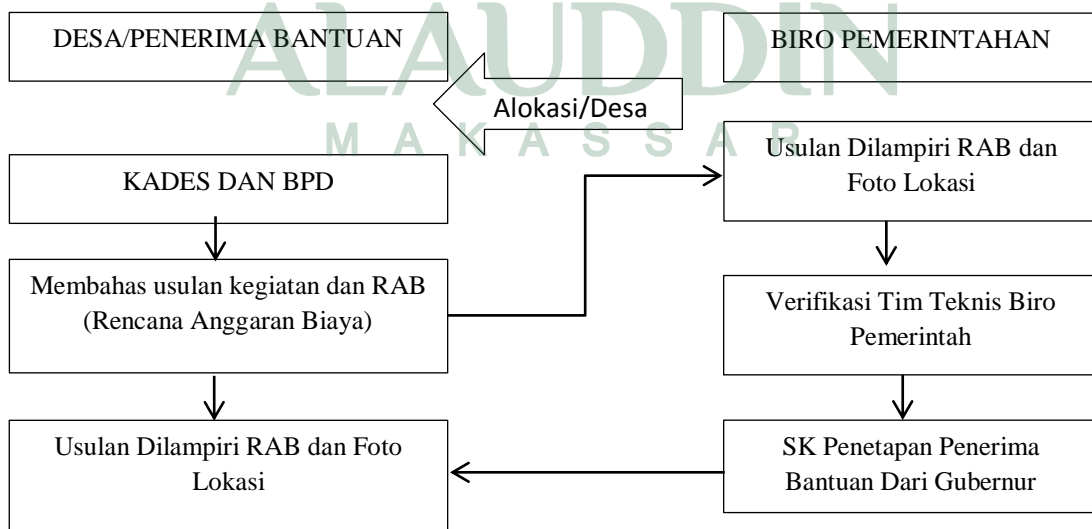
beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat (Hanifah, 2015).

## 2. Perencanaan Program Pembangunan Desa

Rencana dalam rangka pembangunan desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan Camat yang dibantu oleh kepala urusan pembangunan desa kecamatan yang selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa. Semua rencana atau usulan dari desa yang telah diterima oleh camat selanjutnya dibahas secara bersama-sama dengan instansi yang ada ditingkat kecamatan melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dengan bimbingan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Kantor Pembangunan Daerah Kabupaten. Mekanisme perencanaan ditunjukkan pada gambar 1 berikut:

**Gambar 2.3:**

Mekanisme Perencanaan



Sumber: Hanifah, 2015

### ***E. Fraud (Kecurangan)***

Menurut kamus hukum, mengartikan fraud (Inggris) = fraude (Belanda) sebagai kecurangan. Fraud diartikan sebagai kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan organisasi dengan cara penipuan yang disengaja, pengambilan aset kantor, pemalsuan catatan dan pembukuan, penyelewengan, pembebanan yang melebihi dari yang seharusnya dan tanpa dasar, dan lain-lain. Menurut Thomas (2015) mengatakan bahwa Fraud adalah tindakan curang, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri/kelompok merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi).

Definisi lain menurut Comer dalam Tunggal (2011) yang mengatakan bahwa Penipuan adalah setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur atas yang lain. Kecurangan adalah tindakan disengaja yang melanggar hukum pidana di mana tidak ada alasan *applies* hukum dan di mana ada negara untuk menyusun undang-undang tersebut dan endores hukuman dalam menanggapi pelanggaran mereka. Perbedaan ini penting. Tidak semua penipuan adalah kejahatan dan mayoritas kejahatan yang tidak penipuan. Perusahaan hilang melalui penipuan, tapi polisi dan badan-badan penegak hukum lainnya dapat mengambil tindakan hanya terhadap resiko kejahatan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat menyebabkan timbulnya kerugian dari tempat melakukan tindakan *fraud*. Hal tersebut dikarenakan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran karena dilakukan secara sengaja oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan yang bukan merupakan hak pelakunya. Kecurangan juga merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah karena bertentangan dengan syariat islam, Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Muthaffifin Ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang itu”(Q.S: Al-Mutaffifin:1)

Ayat diatas menjelaskan bahwa demi untuk mendapat keuntungan yang banyak, orang tidak segan untuk melakukan tindak kecurangan. Baik dalam menyukai dan manggantang ataupun didalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakan. Mereka mempunyai dua macam sukat dan gantang ataupun anak timbangan; sukat dan timbangan pembeli lain dengan timbangan penjual. Itulah orang-orang yang celaka: “Celakalah atas orang-orang yang curang itu.”

Berdasarkan penjelasan Ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dapat dilakukan oleh seseorang demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih meskipun hal tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Begitupun dengan pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan, demi untuk mendapatkan laba atau profit seorang manajemen dapat melakukan kecurangan terhadap pengelolaan



keuangan perusahaan. Tindakan yang demikian menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji sehingga menurunkan kualitasnya.

Trianto (2013) mengemukakan bahwa Kecurangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar peraturan dan perundangan, fraud terbangun dari tiga unsur yang meliputi: *Conversion* (menipu, merekayasa, membohongi, manipulasi dll). *Concealment* (menyembunyikan melalui penyajian informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya) dan *Theft* (mengambil kekayaan secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi).

### **Tipe - Tipe Kecurangan**

Secara garis besar kecurangan berdasarkan pelakunya terbagi atas dua kelompok menurut Tunggal (2011: 3):

#### **1) Pihak dalam perusahaan (*Internal*)**

- a) Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Contoh: perusahaan yang membuat neraca palsu dengan menaikkan nilai aktiva serta tidak mencatat hutang.
- b) Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*). Contoh: Seorang pegawai di bidang persediaan yang juga memegang catatan persediaan. Dengan kesempatan yang ada, mereka dapat mengambil item-item persediaan dan menutupi pencurian itu dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

## 2) Pihak Luar Perusahaan (*External*)

Pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, supplier, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Contoh: *Supplier*, kecurangan yang dilakukan berupa kecurangan pada saat pengiriman 28 barang yang tidak sesuai dengan perjanjian jual-beli, seperti kualitas barang berbeda, jumlah tidak sesuai, pengiriman tidak tepat waktu, penagihan berulang-ulang yang dilakukan pada transaksi sama, sedangkan, oleh debitur sebagai penerima piutang pada umumnya melakukan penggelapan barang, pembayaran piutang tidak sesuai perjanjian.

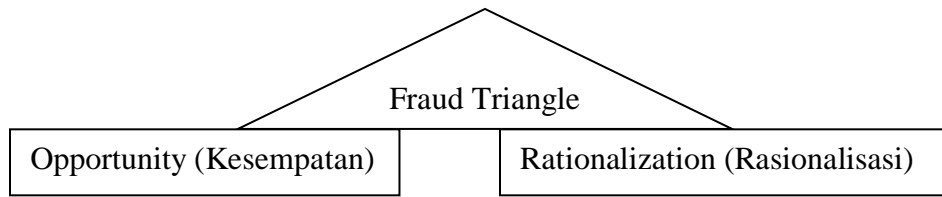
Kecurangan (*Fraud*) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Namun, kecurangan timbul bukan karena tanpa alasan. Umumnya kecurangan terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

### *The Fraud Triangle*

Konsep *fraud triangle* pertama kali dikemukakan oleh *Donald Cressey* (Suprajadi, 2009). Menurut Tunggal (2012) Dalam praktik kecurangan, terdapat beberapa hal yang mendorong terjadinya upaya *fraud yang popular dengan nama segitiga kecurangan (Fraud Triangle)*, Sebagaimana diilustrasikan seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 2.4 :**  
*Fraud Triangle*

Pressure/ Incentivel (Tekanan)
--------------------------------



Sumber: Tunggal, 2012



Berikut ulasan dari *Fraud Triangle* di atas:

Kecurangan terjadi dalam suatu perusahaan dikarenakan adanya dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* (***pressure***), peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi (***opportunity***), dan elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya (***rationalization***).

1) *Incentive/pressure* (tekanan).

*Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2) *Opportunity* (kesempatan).

*Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3) *Attitude* (Rasionalisasi).

*Attitude* merupakan elemen penting terjadinya *fraud*, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya atau merasionalkan tindakannya, sehingga pelaku

membenarkan hal tersebut, misalnya: pelaku merasa telah cukup lama bekerja dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain). Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar tetapi seorang manajer tidak memberikan sedikitpun kepada karyawannya.

#### Jenis – Jenis Kecurangan

*Fraud* berdasarkan pelaku dikelompokkan menjadi:

- a) Employee fraud (kecurangan pegawai), adalah kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu organisasi kerja.
- b) Management fraud (kecurangan manajemen), adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud, biasanya mencurangi pemegang kepentingan organisasinya.

Menurut Maulana (2014) mengelompokkan Jenis Fraud berdasarkan tindakannya dan Amrizal (2004) mengungkapkan menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) kecurangan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

##### 1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*. Kelompok fraud terhadap laporan keuangan misalnya:

- a. Memalsukan bukti transaksi
- b. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
- c. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
- d. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
- e. Menerapkan metode pengakuan liabilitass sedemikian rupa sehingga liabilitass menjadi nampak lebih kecil dibandingkan seharusnya.

## 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘kecurangan kas’ dan ‘kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*). aset misappropriation di kelompokkan menjadi dua macam:

- a. *Cash missapproapriation* – penyelewengan terhadap aset yang berupa kas (misalnya penggelapan kas, mengambil cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor).
- b. *Non cash missapproapriation* – penyelewengan terhadap aset non kas (misalnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi)

## 3) Korupsi (*Corruption*)

Menurut Rusdi dan Susanti (2015) Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang

lingkupnya. Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest*)

Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan (biasanya manajemen level) memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha). Dikatakan memiliki hubungan istimewa karena memiliki kepentingan tertentu (misal: punya saham, anggota keluarga, sahabat dekat, dll). Ketika perusahaan bertransaksi dengan pihak luar ini, apabila seorang manajer / eksekutif mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya itu, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka ini termasuk tindakan fraud.

b. Menyuap atau menerima suap, imbal balik (*bribes and excoiation*)

Suap apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyupa dan menerima suap merupakan tindakan fraud. Tindakan lain yang masuk ke dalam kelompok fraud ini adalah: menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan (baik berupa data atau dokumen) apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

**F. Tanggapan para aparat desa terhadap filosofi “*malempu na mapaccing*” dalam mengelola keuangan desa**

Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang dilakukan berdasarkan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan sangat penting dalam suatu entitas, dimana laporan keuangan tersebut merupakan ringkasan pencatatan atau pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen baik berupa kewajiban maupun laba suatu perusahaan (profit maupun nonprofit). Laporan Keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Manajemen atau aparat pemerintah desa harus melakukan pengelolaan keuangan yang andal karena hasil dari pengelolaan keuangan tersebut dibutuhkan oleh pihak pengguna laporan keuangan desa terkait dengan penggunaan dana desa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen harus berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Akuntabel, Transparan, Responsibility, namun hal demikian belum bisa menjamin kualitas dan keandalan suatu laporan keuangan dimana masih begitu banyak orang yang melakukan kecurangan meskipun ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemahaman terhadap nilai dari budaya sendiri sangat perlu untuk mendukung efektif dan efisiensinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh para aparat desa. Pemahaman nilai budaya Bugis yaitu "*Malempu na mapaccing*" merupakan suatu nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bugis sehingga sangat mendukung untuk diaplikasikan dalam suatu entitas. Oleh karena itu, para aparatur



harus bisa memahami secara mendalam terkait nilai tersebut. Pengelolaan keuangan yang dilakukan *malempu na mapaccing* pasti akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal dimana dalam melakukan pengelolaan keuangan manajemen harus memprioritaskan falsafah *Malempu* yang berarti jujur dan *Mapaccing* yang berarti bersih. Adanya falsafah Bugis yang diprioritaskan manajemen dalam melakukan pengelolaan keuangan maka manajemen dapat menyajikan laporan keuangan yang andal sesuai dengan yang diharapkan oleh para pengguna laporan keuangan.

Falsafah Bugis *malempu* pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang manajemen dan kepala desa dimana puncak pengelolaan keuangan dilakukan oleh mereka. Terkait hal itu, dengan menanamkan falsafah *malempu* atau bersih dalam diri seseorang maka falsafah *malempu* pun akan terwujud. Hati atau jiwa yang bersih pasti akan menghasilkan tindakan atau tingkah laku yang bersih pula yaitu bertingkah laku jujur dalam melakukan suatu kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang manajer harus betul-betul menyajikan laporan keuangan secara andal sesuai dengan etika profesi yang berlaku. Maka nilai-nilai falsafah mampu memberikan hasil pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik. Hal tersebut dapat diperoleh dalam nilai kearifan yang terkandung dalam unsur-unsur falsafah "*Malempu na mapaccing*" yaitu kejujuran dan kebersihan.

Budaya Bugis tersebut sejalan dengan teori sterward dimana setiap manajemen harus mementingkan oraganisasi dan tidak mengedepankan kebutuhan pribadi. Selain dari teori sterward, teori etika juga sejalan dengan budaya dimana

dalam mengelola keuangan harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis dan juga sesuai dengan syariat islam. Pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan syariat islam menandakan bahwa tindakan tersebut tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan bahkan melakukan segala sesuatu untuk memikirkan hal yang berkaitan dengan orang yang seharusnya merasakan apa yang dirasakannya.

#### **G. Filosofi *Malempu na Mapaccing* Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan**

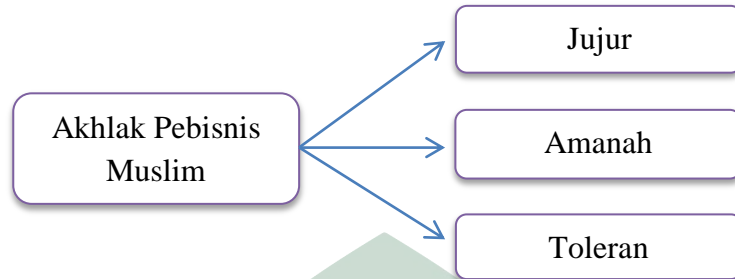
Pada konteks pemerintahan, Falsafah “*Malempu na mapaccing*” bisa diakselerasi sebagai gagasan pokok dalam membangun masyarakat yang amanah, jujur, bersih dan bertanggung jawab. Salah satu penerapannya , mampu ditantamkan pada model kepemimpinan *Tau Malempu na Mapaccing* yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat yang meletakkan amanahnya serta menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Para pemimpin yang berorientasi pada falsafah *malempu na mapaccing* dalam mengelola keuangan akan mampu untuk mengontrol diri agar tidak melakukan kesalahan yang bisa merugikan masyarakat yaitu tindak kecurangan.

Falsafah Bugis tersebut sejalan dengan teori simbolis yang menggambarkan kejujuran dan kebersihan melalui tindakan yang dilakukannya. Selain dari itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyalahi aturan yang berkaitan dengan profesi mereka. Sebagaimana dalam hadis

dan sunnah Rasulullah menjelaskan tentang akhlak yang harus dimiliki oleh pebisnis muslim:



**Gambar 2.5**  
Akhlak Pebisnis Muslim



Sumber: Badroen, 2005

Khairani, 2015 mengemukakan bahwa Kunci etis dan moral bisnis itu terletak pada pelaku bisnis itu sendiri, apabila perilaku etika bisnis dan moral bisnis malempu na mapaccing di pegang teguh oleh seorang manajer dan meyakini bahwa segala tingkah laku yang dilakukan dengan adanya unsur kecurangan maka tidak akan mendapat keberkahan dan akan mendapat ancaman dari Allah. maka seorang pelaku bisnis akan takut melakukan praktik kecurangan dalam hal apapun itu.

Adapun akhlak yang baik dalam pebisnis islam yaitu:

#### 1. Kejujuran

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits: "tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan pada surga"

#### 2. Amanah

Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang

mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur melampaui batas.

### 3. Toleran

Bahwa dengan adanya rasa toleransi dalam diri seorang pebisnis muslim maka akan dapat mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.

Islam memandang bahwa para manajemen maupun akuntan harus memiliki akhlaq/sifat jujur, menepati amanah, dan jujur dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan tidak melakukan tindak kecurangan. Kejujuran (Malempu) merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam berbisnis karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam mengharuskan berbuat adil ataupun jujur yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, selain itu islam melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihthikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain (Darmawati, 2014). Al-Qur'an dan Al-Hadit's telah menjelaskan bahwa setiap tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang pasti

akan mendapat balasan, Sebagaiman Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa/4:29).”

Dari paparan terjemahan ayat diatas, Islam memandang bahwa para aparat pemerintah desa maupun akuntan harus memiliki akhlaq/ sifat jujur, menepati amanah, dan jujur dalam melaporkan hasil dari laporan keuangan kepada para penggunanya. Begitupun dengan Ancaman yang Allah dijelaskan dala surah Az-Zumar ayat 60:

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Dan pada hari kiamat, kalian akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah yakni mereka mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu terdapat orang-orang yang menyombongkan diri.”

Penjelasan dari ayat diatas Allah memberitahukan tentang kehinaan orang-orang yang berdusta terhadap-Nya, dan bahwa wajah-wajah mereka pada hari Kiamat akan hitam seperti malam yang kelam, di mana orang yang berada di maufiq (Padang Masyhar) mengetahui mereka. Kebenaran adalah sesuatu yang terang, tetapi karena mereka

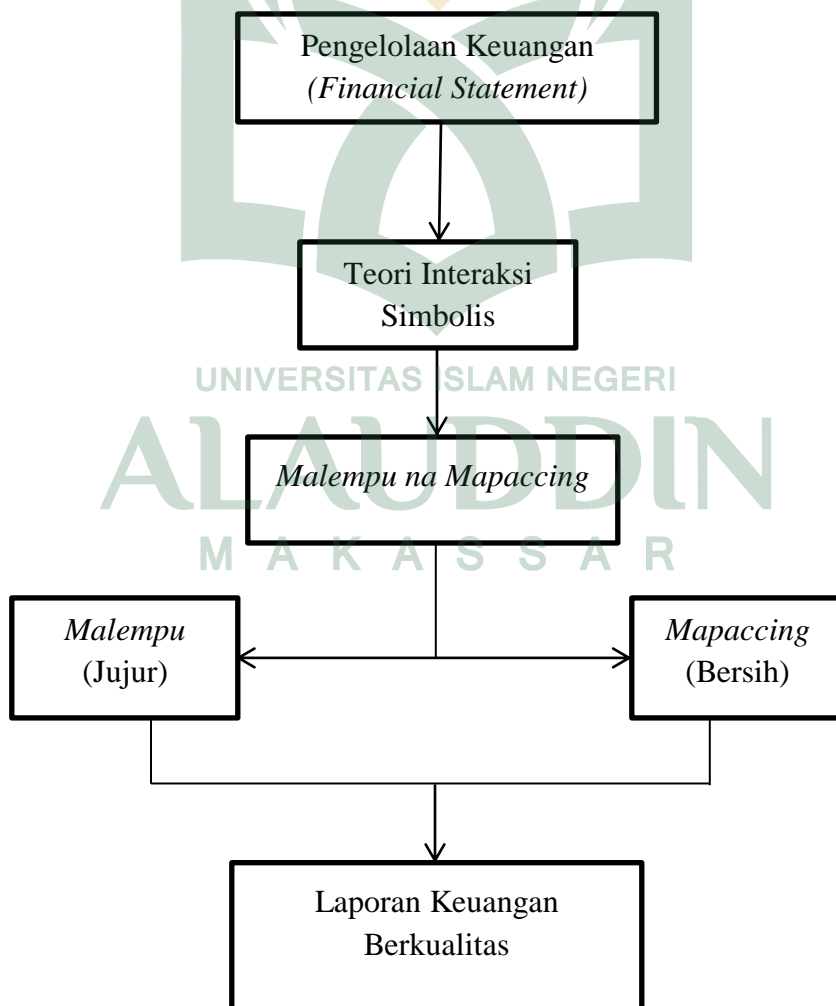
menghitamkan wajah kebenaran dengan kedustaan, maka Allah menghitamkan wajah mereka sebagai balasan yang sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Mereka memperoleh wajah yang hitam dan azab yang keras di neraka Jahannam. Oleh karena itu, Allah berfirman , “Bukankah neraka Jahannam itu tempat bagi orang yang menyombongkan diri?” Di sana terdapat azab, penghinaan dan kemurkaan yang besar untuk orang-orang yang sombong dan akan diambil hak dari mereka yang ketika didunia mereka tidak penuhi. Oleh karena itu Falsafah Bugis *Malempu na mapaccing* merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam berbisnis karena falsafah tersebut akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak (Marzuqi dan Latif, 2010).

#### **H. Rerangka Pikir**

Kerangka pikir/konsep (*Frame of Conceptual*) adalah gambaran atau bangunan utuh suatu penelitian, dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan-kemungkinan lain yang ingin dihasilkan dari keseluruhan penelitian (Ibrahim, 2015). Kerangka Pikir pada penelitian ini dimulai dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para aparat desa yang sesuai dengan aturan pemerintah serta asas-asas pengelolaan keuangan. Adapun teori yang mendukung untuk pengelolaan keuangan tersebut tersebut yaitu *Teori interaksi simbolis*

. Falsafah tersebut perlu ditanamkan pada diri seseorang agar melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan teori dan falsafah tersebut. Menerapkan Falsafah Bugis yakni perilaku *Malempu* (jujur) dan *Mapaccing* (bersih) agar praktik kecurangan dapat ditekan. Oleh karena itu tindakan manajemen atau aparat pemerintah dalam mempercantik laporan keuangan dapat di tekan, dan selanjutnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Secara lengkap rerangka pikir penelitian ini disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.6:**  
Rerangka Pikir





### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Nana Sudjana (2009) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting. Analisis kualitatif itu sendiri, terdiri atas pengukuran data yang dibuat berdasarkan pandangan sementara yang dibentuk secara spesifik, teori tidak mutlak mendominasi dan lebih cenderung bersifat induktif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya: disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2010 dalam Shodiq dan

Febri, 2015). Penelitian kualitatif didasarkan pada dua alasan yaitu, *Pertama* permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan dengan fakta alaminya.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar sebagaimana adanya, tanpa manipulasi diatur dengan eksperimen atau test (Rahmat, 2009). Penelitian kualitatif interpretatif adalah metode yang digunakan untuk melihat sebuah fakta sebagai suatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Paradigma interpretif yang digunakan terfokus pada sifat subjektif dari *sosial world* dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data pada salah satu instansi pemerintahan yaitu Kantor Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian memberikan asumsi bahwa dunia sosial, sebagaimana ilmu pengetahuan dikelola, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, solusi dan kriteria pembuktian (Andranovich dan Riposa, 1993). Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan paradigma interpretif. Teknik etnografi yang dikembangkan oleh Spradley tahun 1980 tersebut sangat penting dikuasai oleh peneliti yang berparadigma kualitatif agar bisa memahami karakteristik sebuah

komunitas secara lebih komprehensif (Koeswinarno, 2015). Dimana tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Arti lainnya adalah etnografi mempelajari masyarakat dan belajar dari masyarakat.

Objek etnografi adalah kebudayaan yang memiliki unsur eksplisit dan implisit. Penelitian tentang unsur-unsur kebudayaan yang eksplisit dapat dilakukan dengan mudah karena unsur-unsur kebudayaan seperti itu relatif terungkap oleh partisipan secara sadar. Sebaliknya, penelitian berhubungan dengan unsur-unsur kebudayaan yang implisit, yang tercipta dan dipahami secara tidak sadar oleh pemiliknya, maka data dan makna harus disimpulkan secara hati-hati berdasarkan penuturan dan tingkah laku para partisipan. Hal inilah yang membuat seorang etnografer perlu terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti dengan berperan sebagai pengamat berpartisipasi (*participant-observer*).

Nurhayati (2015) mengemukakan paradigma interpretif dimulai dari suatu fenomena yang selanjutnya dialami untuk menghasilkan teori. Interpretif memahami makna atas pengalaman seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Pengalaman bukan kenyataan empirik yang bersifat obyektif, melainkan pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang dilalui seseorang. Paradigma interpretif juga merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas, atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi sebagai metode riset dan observasi langsung dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta untuk mengetahui tindakan dan sikap-sikap para aparat yang kemudian mengkaji kebenaran ,realitas atau kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang dan disandingkan dengan unsur budaya setempat baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh para aparat desa yang sesuai dengan nilai “*Malempu na Mapaccing*”.

### **C. Subjek Penelitian**

Penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan memiliki 3 kriteria informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa. Kriteria informan terdiri atas:

- 1) Informan Kunci, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Dimana Informan Kunci adalah Kepala Desa Pattiro Bajo
- 2) Informan Utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama adalah: Sekertaris Desa Pattiro bajo dan Pendampig Desa

- 3) Informan Tambahan, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan tambahan adalah: Masyarakat atau Tokoh Masyarakat yang mengerti tentang Falsafah Bugis “*Malempu na Mapaccing*”.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Indriantoro dan Supomo (2013) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Indriantoro dan Supomo, 2013 juga menjelaskan bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara (data hasil wawancara) sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku-buku ataupun dokumen terkait yang relevan (peneliti sebagai tangan kedua).

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan penelitian ini membutuhkan data penelitian, dimana untuk mengumpulkan data yang diperlukan digunakan dua metode yaitu metode primer dan

metode sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*Face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang (Yusuf, 2014). Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

### 2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen sosial perusahaan.

#### 4. *Internet searching*

Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari *internet* guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Media yang digunakan dalam penelitian ini berupa handphone untuk merekam hasil wawancara, kamera untuk melakukan dokumentasi pada saat wawancara dan mengabadikan beberapa data dalam kondisi tertentu, draft wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk narasumber dan draft hasil wawancara untuk mengabadikan keterangan atau informasi yang diperoleh serta draft observasi. Laptop dan modem untuk mengakses beberapa jurnal dan artikel.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana yang digunakan untuk mengkaji informasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, menurut Bog dan dalam Sugiyono (2005) “bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi data, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain”.

Penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, seperti yang terlihat pada gambar dibawah:

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil [wawancara](#), observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses



reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

### 3. Penyajian Data (*data Display*)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## **H. Pengujian Keabsahan data**

Penelitian ini dalam menguji keabsahan data maka digunakan metode triangulasi data. Triangulasi sendiri menurut diartikan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber dan

triangulasi teori. Namun peneliti hanya menggunakan dua dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
2. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretis secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Desa Pattiro Bajo**

Desa Pattiro Bajo sebelumnya merupakan 2 (dua) Kampung yang disebut Kampung Bajo dan Kampung Mabbiring yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang Kepala Kampung bernama H. Mappanyompa hingga sampai pada tahun 1964, dimana pada tahun itu terbentuklah sebuah Desa yang diberi nama Desa Gaya Baru yang di pimpin oleh H. Mappanyompa, dan masyarakat mulai merintis dan membuat jalan Desa dengan sistem gotong royong. Seiring dengan pergantian nama dan Kepala Desa dalam kerangka peningkatan kapasitas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan maka pada akhirnya nama Desa Gaya Baru diganti menjadi Desa Pattiro Bajo, kemudian pada sekitar tahun 1990 dibawah Pimpinan A. Tappu, Desa Pattiro Bajo mengalami Pemekaran, Desa yang dulunya Kampung Mabbiring menjadi sebuah Desa yang diberi nama Desa Mabbiring. Pemerintahan A. Tappu berakhir pada Tahun 2002 di gantikan oleh Drs. H.M. Yusuf Mappanyompa mulai Tahun 2003-2014 (selama 2 periode). Sejak terbentuknya Desa Pattiro Bajo, telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan juga telah banyak dilaksanakan perubahan terutama dalam sektor pertanian. Permasalahan telah banyak terselesaikan, akan tetapi karena perkembangan

waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Sebelum berakhir periode ke-2 beliau meninggal dunia dan waktu itu di Jabat oleh Sekdes sampai terpilihnya Kepala Desa berikutnya (Muhammad Akil) yang merupakan kepala desa keempat di Desa Pattiro Bajo Periode 2015-2021.

## **2. Keadaan Geografis**

Desa Pattiro Bajo, merupakan salah satu desa dari 20 (dua) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Sibulue yang terletak  $\pm 2$  (dua) km dari ibukota Kecamatan dan  $\pm 17$  (tujuh belas) km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Pattiro Bajo dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Pattiro Bajo 652 Ha sekitar 2 km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Desa Pattiro Bajo, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ajang Pulu, Desa Letta Tanah dan Desa Pattiro Riolo.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mabbiring.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakasalo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinnong dan Kelurahan Maroanging.

Desa Pattiro Bajo, memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Pattiro Bajo, sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian. Secara administratif wilayah Desa Pattiro Bajo, terdiri atas 3 ( tiga ) dusun dan 9 RT yaitu

Dusun Bajo Rilau terdiri dari 3 (tiga) RT, Dusun Pattiro Bajo Tengah terdiri dari 3 (tiga) RT dan Dusun Pattiro Bajo Riaja terdiri dari 3 (tiga) RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Pattiro Bajo, sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

### 3. Keadaan Demografi

Penduduk Desa Pattiro Bajo Tahun 2016 (sumber data)  $\pm$  1.444 jiwa. Terdiri dari laki-laki 653 jiwa sedangkan perempuan 791 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Pattiro Bajo 1.444 terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 357 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Sementara itu penduduk yang masih dalam status menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 249 orang, sedangkan yang putus sekolah di usia 7 s/d 24 tahun sebanyak 82 orang.

### Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah kebun/ladang seluas 188,8 ha dan sawah 374,94 ha. untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Pattiro Bajo, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4.2:**  
Luas Wilayah Desa Pattiro Bajo, Menurut Penggunaannya

NO	URAIAN	LUAS (HA/M <sup>2</sup> )
1	Persawahan	439,94 ha

2	Perkebunan/Ladang	188,8 ha
3	Pekuburan	1,10 ha
4	Pemukiman	14,35 ha
5	Perkantoran	8,61 ha
<b>JUMLAH</b>		652,8 ha

Sumber Data : SDDK Tahun 2016

Adapun untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Pattiro Bajo, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3:**  
Potensi, Komoditas dan Pemasarannya

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
<b>A.</b>	<b>PERTANIAN :</b>		
1	Tanaman Pangan	Padi, Jagung, Kacang tanah, Ubi Jalar, Cabe.	Pemasaran hasil pertanian, peternakan Langsung ke
2	Perkebunan	Jeruk, Mangga, Pisang, Jahe, Kepala, coklat, Jambu Mente	Konsumen, pasar dan pengecer, sedangkan Bahan galian langsung ke konsumen.
<b>B.</b>	<b>PETERNAKAN:</b>	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing, angsa, bebek	
<b>C.</b>	<b>TAMBANG/BAHAN GALIAN</b>	Batu Kali dan pasir	

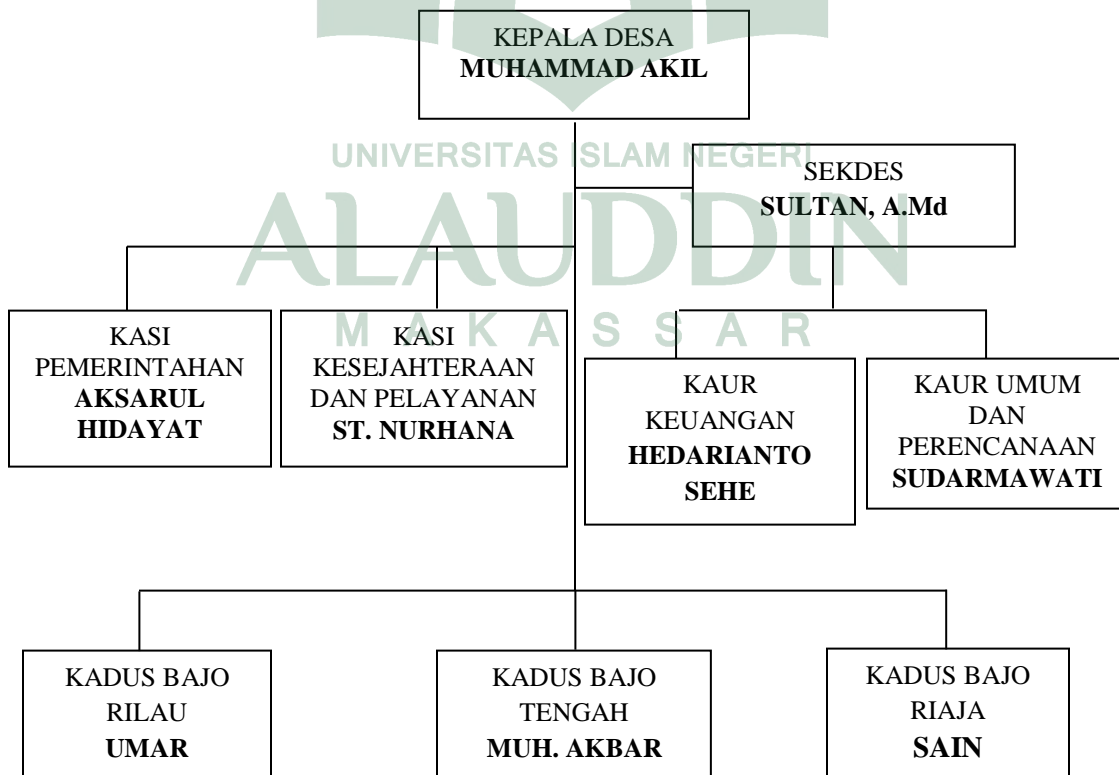
Sumber : SDDK (2016) dalam RPJMDes (2016)

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pattiro Bajo, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Pattiro Bajo yang menerima Raskin sebanyak 114 KK, pemegang KPS/KIS/KIP sebanyak 442 Dengan tingkat kemiskinan masyarakat tersebut, berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat.

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Pattiro Bajo, (masih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa) adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.6:**  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pattiro Bajo



Sumber: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pattiro Bajo, 2015

Kondisi aparat pemerintah desa dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4:**  
Kondisi Aparat Pemerintah Desa Pattiro Bajo

NO	NAMA	JABATAN	UMUR (THN)	TINGKAT PENDIDIKAN	KET
1.	Muhammad Akil	Kepala Desa	52	Diploma	
2.	Sultan, A.Md	Sekretaris Desa	35	Diploma	
3.	Aksarul Hidayat	Kasi Pemerintahan	24	SMA	
4.	St. Nurhana	Kasi Kesejahteraan	41	SMA	
5.	Hedarianto Sehe	Kaur Keuangan	30	SMA	
6.	Sudarmawati	Kaur Umum	47	SLTA	
7.	Umar	Kadus Bajo Rilau	51	SMP	
8.	Muh. Akbar	Kadus Bajo Tengah	52	SMP	
9.	Sain	Kadus Bajo Riaja	52	SLTA	

Sumber : SDDK (2016) dalam RPJMDes (2016)

Apabila akan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 tahun 2015, maka harus dilakukan perubahan atau penggantian terhadap perangkat desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan umur maksimal 60 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/ sederajat. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa,



Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama dengan kelembagaan yang ada di Desa.

Kelembagaan desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa seperti: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Karang Taruna, RT/RW, Kader Dasawisma, Kelompok Tani, Kader Posyandu, Tokoh Agama, Linmas dll.

Adapun keadaan sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di Desa Pattiro Bajo dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kantor Desa sudah dalam kondisi baik
- b. BPD tidak memiliki Kantor
- c. PKK tidak memiliki kantor
- d. Kepala Dusun tidak memiliki kantor
- e. Sudah memiliki Balai Pertemuan.
- f. Mobiler masih kurang

## **5. VISI DAN MISI**

### **a. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Pattiro Bajo untuk periode 2016-

2021 adalah **“Menjadikan Desa Pattiro Bajo sebagai Desa yang Aman, Tertib, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”**

#### **b. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Desa Pattiro Bajo, dirumuskan 4 Misi sebagai berikut ;

- 1) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi diperlukan untuk memperjelas cara implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

#### **7. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

##### **a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa sebagai dana perimbangan yang bersumber dari DAU Kabupaten, dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan Pemerintah/ Kabupaten/ Provinsi, dana hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Kebijakan pendapatan Desa Pattiro Bajo senantiasa diarahkan pada upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan desa dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan pendapatan desa secara signifikan. Adapun proyeksi pendapatan desa Pattiro Bajo diproyeksikan sebagaimana tersebut pada tabel/matriks di bawah ini.

**Tabel 4.5:**  
Proyeksi Pendapatan Desa Pattiro Bajo Tahun 2016-2021

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	PENDAPATAN	942.704.000	1.337.812.000	1.569.782.000	1.806.047.000	2.047.081.000	2.293.402.000
<b>A</b>	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	Pendapatan Transfer	942.704.000	1.337.812.000	1.569.782.000	1.806.047.000	2.047.081.000	2.293.402.000
1	Dana Desa	603.817.000	963.537.000	1.156.245.000	1.348.952.000	1.541.660.000	1.734.367.000
2	Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	15.526.000	15.526.000	15.526.000	15.526.000	15.526.000	15.526.000
3	Alokasi Dana	323.361.000	358.749.000	398.011.000	441.569.000	489.895.000	543.509.000

	Desa						
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-
C	<i>Pendapatan Lain-lain</i>	0	0	0	0	0	0
1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	942.704.000	1.337.812.000	1.569.782.000	1.806.047.000	2.047.081.000	2.293.402.000

Sumber : SDDK (2016) dalam RPJMDes (2016)

#### b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun sebelumnya serta hasil evaluasi kegiatan dalam skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan desa yang akan diperoleh. Kebijakan belanja desa diarahkan pada prioritas rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Adapun belanja desa meliputi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan

bidang pemberdayaan masyarakat. Proyeksi belanja desa disesuaikan dengan proyeksi pendapatan desa.



**Tabel 4.6**  
Proyeksi Belanja Desa Pattiro Bajo Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	BELANJA	942.704.000	1.337.812.000	1.569.782.000	1.806.047.000	2.047.081.000	2.293.402.000
A	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	282.811.200	401.343.600	470.934.600	541.814.100	614.124.300	688.020.600
B	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	565.622.400	802.687.200	941.869.200	1.083.628.200	1.228.248.600	1.376.041.200
C	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	47.135.200	66.890.600	78.489.100	90.302.350	102.354.050	114.670.100
D	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	47.135.200	66.890.600	78.489.100	90.302.350	102.354.050	114.670.100
E	<i>Bidang Tidak Terduga</i>						-
JUMLAH BELANJA		942.704.000	1.337.812.000	1.569.782.000	1.806.047.000	2.047.081.000	2.293.402.000

Sumber : SDDK (2016) dalam RPJMDes (2016)

#### c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun-tahun sebelumnya pembiayaan baik itu penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan selalu nihil. Namun demikian diharapkan ke depan kalau anggaran memungkinkan diharapkan Pemerintah Desa Pattiro Bajo dengan kesepakatan BPD dapat melakukan pembentukan Dana Cadangan dan menyertaan

Modal di BUMDes/BUMD. Sehingga dengan adanya pengeluaran pembiayaan tersebut diharapkan Pemerintah Desa disamping mendapatkan Penerimaan Pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penjualan aset desa yang dipisahkan juga mendapat penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan maupun hasil dari penyertaan modal.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### ***1. Tanggapan aparat pemerintahan terhadap filosofi “malempu na mapaccing” dalam mengelola keuangan desa***

Keuangan merupakan segala kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pengelola keuangan (aparat pemerintah) berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh dana, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemerintahan. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Desa-desa memiliki hak istimewa terhadap asal-usul mereka dan hak-hak tradisional dalam melakukan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa serta

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya (Chomariyah *et al*, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengelola keuangan yang sesuai dengan Asas *Good Governance* merupakan suatu tanda bahwa instansi tersebut telah melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Asas *Good Governance* memiliki 3 dasar yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan sesuai tata tertib disiplin anggaran. Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah Bugis yang memiliki begitu banyak desa yang dalam pengelolaan anggarannya harus sesuai dengan aturan. Meski demikian, masih terdapat beberapa desa yang melakukan pengelolaan keuangannya tidak dengan semestinya. Kejadian tersebut membuktikan bahwa aturan pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengontrol setiap tindakan para aparatur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kesadaran dari diri mereka masing-masing yang lebih tepatnya mengaplikasikan nilai budaya dalam instansi untuk mengontrol para aparatur. Hasil wawancara dengan Pak Sultan selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa:

“Keuangan desa (Dana Desa) merupakan amanah yang diberikan kepada aparat desa sebagai perantara untuk mengembangkan suatu desa sesuai dengan permintaan masyarakat, dimana keuangan tersebut harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan baik tanpa ada sesuatu yang disembunyikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu *Good Governance*. (Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2017)

Penjelasan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mengelola keuangan yang merupakan amanah yang telah diberikan oleh pemerintah kepada para aparat desa dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Aparat desa Pattiro Bajo



telah berusaha melakukan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan pemerintah yaitu sesuai dengan alur pengelolaan keuangan. Dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban. Namun, Pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah belum mampu menjamin bersihnya tindakan para aparat dalam mencatat dan mengelola keuangan. Jadi, untuk memperkuat tindakan yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang diperintahkan baik pemerintah dan agama, maka aparat harus mengaplikasikan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Pengaplikasian nilai budaya yang sangat sesuai dalam mengelola keuangan untuk memperoleh laporan keuangan yang andal.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan efisien (Shaferi dan Handayani, 2014). Pengelolaan keuangan yang baik yaitu melakukan pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tetapi, pada saat sekarang ini aturan pemerintah tersebut tidak lagi menjadi suatu aturan yang terikat bagi aparat pemerintah melainkan hanya menjadi aturan dikertas dan sama sekali tidak diterapkan dalam suatu instansi pemerintahan terlebih Kantor Desa. Oleh karena itu perlunya suatu falsafah *Malempu na mapaccing* untuk mengontrol setiap tindakan pengelolaan yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Fenal selaku pendamping Desa:

“Dalam mengelola keuangan diperlukan iman yang kuat atau implementasi suatu nilai Budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, selain dari mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena aturan tidak menjamin kebersihan pengelolaan keuangan dan keandalan laporan keuangan

kecuali kita sendiri yang mengontrol diri kita”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2017)

Penjelasan narasumber diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan diperlukan iman yang kuat agar diri kita terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan, karena tindak kecurangan dilakukan oleh diri kita sendiri maka pencegahannya pun dilakukan oleh diri kita sendiri. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan mengaplikasikan Budaya “*Malempu na Mapaccing*” yang merupakan Budaya Bugis dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Budaya harus diterapkan dalam suatu instansi agar pengelolaan dapat terarah dan dilakukan secara bersih. Adapun suatu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa Pattiro Bajo, yang mengatakan bahwa:

“Anggaran yang diterima oleh pemerintah langsung ditransfer oleh Menteri Desa tanpa melalui perantara dan dalam pengelolaannya harus dilakukan secara transparan mengingat jumlah Anggaran yang diterima tidak sedikit. Sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan BPD untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya, jadi setiap perubahan yang dilakukan berdasarkan dari permintaan masyarakat sehingga masyarakat tidak akan ada yang keberatan dengan apa yang kami lakukan”. (Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2017).

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa, setiap tindakan yang akan dilakukan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Tidak serta merta langsung melakukan perubahan terhadap desa melainkan membicarakan terlebih dahulu kepada masyarakat terkait langkah yang akan dilakukan oleh para aparat Desa. Setelah melakukan musyawarah, aparat desa kemudian dapat melakukan pembangunan berdasarkan permintaan dari

masyarakat itu sendiri sehingga pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para aparat desa bersifat transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pengelolaan keuangan yang dikelola berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan pemerintah telah mewujudkan nilai amanah yang telah diberikan kepada mereka oleh masyarakat. Nilai amanah merupakan nilai yang paling sesuai untuk diaplikasikan dalam kaitannya dengan pembentukan manajemen yang baik. Menjalankan amanah yang telah diberikan dengan sebaik mungkin dan mewujudkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadikan *Malempu na Mapaccing* sebagai landasan dan pondasi utama pada setiap individu dalam melakukan sesuatu agar hasil dari kegiatan tersebut dapat terarah. Selain dari itu, untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, seorang pemimpin atau aparat dituntut untuk memiliki 4 kualitas yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keempat kualitas itu terungkap dalam ungkapan Bugis:

*“Maccai na Malempu: (Cendekia/Cerdas lagi Jujur)*

*Maraniwi na Magetteng (Berani lagi teguh dalam pendirian)*

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa kecerdasan saja tidak cukup dalam mencatat dan mengelola keuangan. Kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran, karena banyak orang yang cerdas tetapi menggunakan kecerdasannya untuk membodohi orang lain contohnya dalam pengelolaan keuangan yaitu menggunakan kecerdasannya dalam memanipulasi pencatatan dengan melakukan mark up atau mencatat pembelian suatu barang dengan harga Rp. 1.000.000,- tetapi nyatanya harga barang tersebut hanya Rp.500.000,-. Karena itu, kecerdasan haruslah disertai dengan kejujuran. Selanjutnya

keberanian juga tidak cukup. Keberanian haruslah disertai dengan keteguhan dalam pendirian. Orang yang berani tetapi tidak cerdas dan teguh dalam pendirian dapat terjerumus dalam kenekadan. Hasil wawancara dari pak Fenal selaku Pendamping Desa Pattiro Bajo, mengatakan bahwa:

*“Malempu na mapaccing memang harus diaplikasikan dan ditanamkan dalam diri seseorang sebelum melakukan tindakan terlebih jika hal yang akan kita lakukan tersebut berguna bagi kepentingan orang banyak khususnya desa Pattiro Bajo. Hal ini sangat perlu karena para aparat desa berusaha untuk memberikan pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ditugaskan untuk mensejahterakan rakyatnya”.* (Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2017)

Penjelasan yang diberikan oleh pak fenal secara tidak langsung mengemukakan bahwa perilaku *“malempu na mapaccing”* merupakan prioritas utama dalam melakukan segala sesuatu. Namun, ketika mereka melakukan pengelolaan yang sesuai aturan, tidak serta merta dapat dikatakan bahwa mereka mengaplikasikan nilai *malempu na mapaccing*, melainkan kita melihat interaksi mereka terhadap sesama. *“Malempu (kejujuran) na Mapaccing (Kebersihan)”* dapat diwujudkan tidak dengan cukup mengatakan bahwa pengelolaan yang saya lakukan telah sesuai dengan aturan, tetapi memaknai setiap tindakan yang mereka berikan kepada orang lain.

Pemaknaan ini dapat disimbolkan melalui bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, serta perilaku mereka saat berinteraksi dengan para aparat lain yang dapat mencerminkan suatu nilai budaya yang mempengaruhi diri mereka yaitu *“Malempu na Mapaccing”*. Nilai kejujuran dan kebersihan itu muncul berdasarkan simbol-simbol yang mereka berikan yang kemudian orang lain memaknai simbol tersebut yang sejalan dengan *teori interaksi simbolis. Teori Interaksi Simbolis*

mempertimbangkan mengenai norma dan budaya yang menjadi perilaku seseorang. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para wakil rakyat di kantor desa selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengelola keuangan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam *Lontarak* mengungkapkan bahwa seorang pemimpin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik haruslah:

- a. Jujur terhadap Dewata Seuwae dan sesamanya manusia.
- b. Takut kepada Dewata Seuwae dan menghormati masyarakatnya serta tidak pilih kasih
- c. Mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya
- d. Berani dan tegas, tidak gentar hatinya mendapat berita baik dan buruk.
- e. Jujur dalam segala keputusannya.

Selanjutnya wawancara terhadap budayawan yang bernama Abdi Mahesa yang merupakan budayawan termuda di Kabupaten Bone terkait “Implementasi *Malempu na Mapaccing* disaat sekarang ini, mengemukakan bahwa:

“*Malempu na Mapaccing* bagi orang bugis memiliki makna yang fundamental karena merupakan dasar dan sumber tertib hukum dan juga sebagai sarana bagi orang bugis dalam menjalin hubungan antar sesama. Selain dari itu masyarakat bugis juga masih menghargai terhadap apa yang diwariskan oleh para pendahulu meskipun telah terjadi sedikit pergeseran akibat budaya yang selalu berkomunikasi dengan zaman dan menjadi sebuah sumber dan pangkal yang bermuara pada nilai-nilai siri’. *Malempu na mapaccing* dijadikan landasan bagi orang bugis dalam melakukan segala aktivitas”. (Hasil wawancara pada tanggal 29 september 2017)

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh budayawan muda menjelaskan bahwa nilai “*Malempu na Mapaccing*” memang sudah seharusnya untuk diaplikasikan dalam

setiap tindakan. Terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan amanah yang harus mengutamakan *Malempu na mapaccing* karena berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Selain dari itu budaya tersebut juga dapat mempererat silaturahmi sesama manusia. Selain Agama, budaya pun menuntut kita untuk selalu berperilaku jujur dalam bertindak agar hasil yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Mengaplikasikan falsafah Bugis “*Malempu na Mapaccing*” dapat memberi kemaslahatan dalam suatu entitas. Kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dimana sesama karyawan tidak akan ada lagi saling tuduh, saling curiga, dan saling membohongi sehingga tidak mengakibatkan pertengkaran yang bisa mengakibatkan kerusakan hubungan sesama manusia. Pengaplikasian nilai *malempu na mapaccing* dalam mengelola keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dimana laporan keuangan tersebut dikelola dengan hati yang bersih dan integritas yang tinggi. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Pak Sultan selaku sekertaris desa yang mengungkapkan bahwa:

”Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para karyawan Desa Pattiro Bajo memang telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pengelolaan keuangan dilakukan harus berdasarkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan mencoba mengaplikasikan Nilai dari budaya kita sendiri yakni “*Malempu na Mapaccing*”. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan otomatis akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pada tahun 2016 Inspektorat mengeluarkan opini WTP yang menandakan bahwa laporan keuangan desa Pattiro Bajo memang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa ada penyelewengan amanah” (Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2017)

Berdasarkan ungkapan dari sekretaris desa diatas menjelaskan pada tahun 2016 setelah Inspektorat atau BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan desa Pattiro Bajo, ternyata BPK tidak menemukan adanya sesuatu yang mencurigakan atau tindak manipulasi bersifat salah saji yang dilakukan dalam mengelola keuangan sehingga laporan keuangan Desa yang dihasilkan andal dan berkualitas. Dampak dari kualitas laporan keuangan yang terbebas dari manipulasi atau kecurangan, sehingga BPK atau Inspektorat mengeluarkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) sebagai bukti bahwa dalam laporan keuangan Desa Pattiro Bajo memang benar-benar tidak ditemukan tindakan kecurangan terhadap anggaran Desa.

Adapun Alur Pengelolaan Keuangan yang dilakukan para aparat Desa Pattiro Bajo yaitu:

**a. Perencanaan**

Desa Pattiro Bajo telah melakukan perencanaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan penyusunan RKPDesa sesuai dengan semestinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Sultan yaitu:

“Proses perencanaan yang kami lakukan. Pertama, menyusun RKP dengan melibatkan para aparatur, BPD dan partisipasi dari masyarakat. Penyusunan tersebut dilakukan dengan musyawarah (MUSDES) untuk membahas mengenai Anggaran Desa yang diterima dan rencana pembangunan yang akan dilakukan, kemudian disetujui dan sepakati secara bersama, setelah semua rampung maka langkah selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disetujui dan dikelompokkan dalam komponen belanja APBDesa”. (Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2017)

Upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam tahap perencanaan dilakukan tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Adanya musyawarah yang dilakukan terkait RKPDesa telah mewujudkan asas transparansi, selain dari itu didorong dari nilai yang melekat dalam diri masing-masing untuk selalu “*Malempu na Mapaccing*” dalam melakukan segala sesuatu.

#### **b. Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan yang diungkapkan oleh pak Sultan yaitu:

“Pelaksanaan APBDesa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaannya oleh tingkat pengelola Desa dengan melakukan Musyawarah Desa dengan tokoh masyarakat, BPD dan aparat pemerintah. Rapat tersebut dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sebulan untuk membahas mengenai perkembangan fisik dan penggunaan dana APBDesa” (Hasil wawancara pada tanggal 30 september 2017)

Ungkapan diatas, dapat diketahui bahwa musyawarah yang dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sebulan merupakan wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ditingkat desa. Musyawarah yang dilakukan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah terkait biaya pembangunan dapat diketahui oleh masyarakat.

#### **c. Pelaporan**

Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dibantu oleh PTPKD atau sekretaris desa. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa dilakukan melalui



sistem pelaporan yang secara periodik. Oleh karena itu, proses pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa dibuktikan sedemikian rupa oleh bendahara desa dengan menunjukkan suatu Bukti berupa Nota pengeluaran anggaran. Pelaporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa adanya Falsafah “*malempu na mapaccing*” yang diterapkan oleh para pengelola keuangan (Aparat Desa) untuk mewujudkan asas yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **d. Pertanggungjawaban**

Pemerintah Desa Pattiro Bajo dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan tiap bulan, pemerintah desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APB Desa yang dipimpin oleh kepala Desa. Hasil wawancara dengan pak Sultan:

“Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang penggunaan anggaran sesuai dengan yang semestinya serta mencanumkan kwitansi-kwitansi untuk memperkuat laporan tersebut.”

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan menunjukkan kwitansi-kwitansi untuk membuktikan bahwa para aparatur telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut tidak lepas dari nilai-nilai budaya yang mereka tanamkan dalam diri mereka masing-masing untuk selalu *malempu* dan *mapaccing* dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan diri mereka masing-masing. Sebagaimana dalam suatu ungkapan bahwa “Kenikmatan

yang kita dapatkan di dunia hanyalah sementara dan kenikmatan yang kekal abadi hanya ada ketika kita telah tiada, maka perbanyaklah berbuat ebaikan untuk memperoleh kenikmatan yang kekal tersebut, karena tidak ada suatu kenikmatan yang akan kita rasakan kecuali kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut”.

## **2. *Filosofi “Malempu na Mapaccing” Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menekan Praktik Kecurangan***

Kearifan lokal adalah sebuah kebenaran yang telah menjadi tradisi dalam suatu daerah. Nilai kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Sebagaimana kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci dan berbagai nilai yang ada (*Pappaseng*). *Pappaseng* masyarakat Bugis sama halnya dengan kepatuhan akan adat istiadatnya yang mana tetap mengacu pada *pappaseng* (Petuah) orang-orang terdahulu.

Ungkapan *Pappaseng* yang telah menjadi tradisi di daerah Bugis Bone yaitu *Malempu na Mapaccing*. *Malempu* diartikan sebagai perilaku yang jujur dan *mapaccing* diartikan sebagai perilaku yang bersih kemudian menjadi prinsip dalam berdagang. Sebagaimana pesan leluhur untuk dibudayakan dan diaplikasikan dalam berdagang, dan hal tersebut juga sangat cocok untuk diterapkan dalam suatu instansi maupun berbagai organisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan

pencatatan. *Malempu na Mapaccing* merupakan penggalan dari pepatah Bugis yang berbunyi :

*“Duwami riala sappo unganna panasae belo kanuku’e (Duwami riyala sappo lempu’e sibawa paccing)”*

Artinya:

Hanya dua yang dapat dijadikan pagar, kembangnya nangka dan penghias kuku.

Bunga Nangka dalam bahasa bugis di sebut *Lempu* (Jujur) dan Penghias kuku yang dikenal oleh masyarakat Bugis adalah tanaman pacar kuku yang dalam bahasa Bugis yaitu *pacci* (Bersih). Pagar diri setiap orang sebenarnya sudah cukup bila ia memiliki keduanya, yaitu ia dapat memelihara sifat jujur dan perbuatannya bersih dari noda dan pelanggaran. Adapun hasil wawancara terhadap budayawan bernama Abdi Mahesa mengemukakan bahwa :

*“Malempu na Mapaccing”* merupakan adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bugis, mulai dari zaman dulu hingga pada zaman yang modern seperti saat ini, budaya tersebut pun telah diaplikasikan oleh banyak orang terlebih jika dalam acara pesta perkawinan, semua orang pasti akan mengadakan acara yang biasa disebut dengan *mappacci* untuk mempelai, hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa setiap orang harus bertingkah laku jujur tanpa ada sedikitpun yang disembunyikan, selain dari malempu mempelai juga harus berhati dan berakhlak bersih, sebagai tanda bahwa sebelum memulai suatu keluarga kedua mempelai harus bersih dan terbebas dari berbagai masalah dan dosa. *Malempu na Mapaccing* juga sangat cocok untuk diaplikasikan didunia perekonomian mengingat dalam dunia ekonomi rentan terjadi kecurangan akibat nilai malempu na mapaccing yang dimiliki oleh seseorang itu kurang terlebih dalam melakukan pengelolaan keuangan” (Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2017)

### ***Malempu (Kejujuran)***

*“makkebolai ada tonging ri alena naiyya sampoengngi ad tonging bellewe”*

Artinya:

Jujur itu adalah terdapatnya perkataan yang benar dalam diri seseorang dan yang merusak kejujuran adalah perkataan dusta atau sifat yang suka berkata bohong.

### **Mapaccing (Kebersihan/kesucian)**

*Mapaccing* berarti niat atau I'tiqad yang baik dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Bawaan hati yang baik dari seseorang di mulai dari suatu niat atau i'tikad yang baik (*nia mapaccing*), yaitu suatu niat yang baik dan ikhlas untuk melakukan sesuatu demi tegaknya harkat dan martabat manusia. Sebagaimana ungkapan Lontara' Bugis:

*“Ututuiwi anngolona atimu, aja' muammanasaianngi ri ja'e padammu rupa tau'e nasaba mattentui iko matti narewaki ja'na apa' riturungenngi ritu gau' madecenng riati maja'e nade'sa nariturungeng ati lettu' rimonri ja'na”*

Artinya:

“(Jagalah arah hatimu, jangan menghajatkan yang buruk kepada sesamamu manusia, sebab pasti engkau kelak akan menerima akibatnya, karena perbuatan baik terpengaruh oleh perbuatan buruk. Orang yang beritikad buruk akibatnya akan sampai pada keturunannya keburukan itu)”.

Kutipan lontara diatas menitikberatkan pentingnya seorang individu untuk memelihara arah hatinya. Manusia dituntut untuk selalu berniat baik kepada sesama. Memelihara hati untuk selalu berhati bersih dalam melakukan segala hal. Sebaliknya, individu yang berhati kotor, yaitu menghendaki keburukan terhadap sesuatu, justru akan menerima akibat buruknya. Karena itu, tidak ada alasan bagi seorang individu untuk memikirkan hal-hal buruk, terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, karena setiap perbuatan buruk yang dilakukan akan berdampak pada diri mereka sendiri. Ketika melakukan manipulasi terhadap pencatatan laporan keuangan maka dampaknya pun akan berimbas kepadanya, dengan demikian implementasi nilai

“*malempu na mapaccing*” sangat penting untuk mengontrol setiap tindakan yang akan dilakukan oleh para aparaturnya dan harus memelihara hatinya dari penyimpangan-penyimpangan atau kecurangan.

Kecurangan merupakan suatu kejahatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan dan syariat islam. Tindak kecurangan (*Fraud*) terbangun dari tiga unsur yang meliputi:

- a. *Conversion* (menipu, merekayasa, membohongi, manipulasi dll).
- b. *Concealment* (menyembunyikan melalui penyajian informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya) dan
- c. *Theft* (mengambil kekayaan secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi).

Berdasarkan ketiga unsur tersebut telah mendorong seseorang atau manajemen untuk melakukan berbagai kecurangan dengan mengedepankan keinginan personalnya dalam mengelola laporan keuangan desa untuk memperoleh keuntungan. Tindak kecurangan yang dilakukan yaitu: membuat neraca palsu dengan menyembunyikan anggaran dan menyesuaikannya dalam pencatatan. Kecurangan yang sering terjadi disaat sekarang ini disebabkan karena adanya peluang dan dorongan yang kuat sehingga seseorang tidak segan untuk menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan lebih.

Kecurangan tersebut dilakukan adanya tekanan (*Incentive*), kesempatan (*Opportunity*) dan pembenaran atas tindakannya (*Rationalization*). Adapun jenis kecurangan yang dilakukan oleh berbagai orang antara lain, kecurangan laporan

keuangan dimana dalam laporan keuangan merupakan kunci untuk melakukan tindakan kecurangan (manipulasi). Tindakan tersebut dilakukan, karena lemahnya iman dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya yaitu *malempu na mapaccing* sehingga mereka tidak mampu untuk menjaga perilaku dan hatinya dalam melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang yang mempunyai bawaan hati yang baik tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman: 17

يَبْنِيْ اَقِيْمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ۝١٧

Terjemahnya:

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (Manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (Oleh Allah). (Q.S. Luqman: 17)

Kantor Desa Pattiro Bajo merupakan salah satu sektor publik yang mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan baik aturan dari pemerintah, dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam melakukan sesuatu perlunya pengaplikasian Falsafah *Malempu na Mapaccing* untuk meminimalisir tindak kecurangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Adapun hasil dengan Abdi Mahesa yang mengatakan bahwa:

”Sebelum melakukan segala sesuatu sebaiknya harus menanamkan pada diri sendiri nilai *Malempu na mapaccing*. Nilai *malempu na mapaccing* dapat dijadikan sebagai pagar diri agar segala sesuatu yang dilakukan dapat terkontrol terlebih dalam melakukan pengelolaan keuangan yang merupakan kunci untuk melakukan tindakan manipulasi (kecurangan)” (Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2017)

Berprilaku *malempu na mapaccing* merupakan cara yang tepat untuk diterapkan dalam mengelola keuangan. *Malempu na Mapaccing* dapat berguna untuk menekan tindak kecurangan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Selain dari itu, kecurangan juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran, karena dilakukan secara sengaja oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan yang bukan merupakan haknya. Tindak kecurangan juga merupakan satu perbuatan yang sangat dibenci Allah karena bertentangan dengan syariat islam, Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah Al-Muthaffifin, Ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang itu” (Q.S. Al-Muthaffifin/ 83:1)

Ayat diatas menjelaskan bahwa demi untuk mendapat keuntungan yang banyak, orang tidak segan untuk melakukan tindak kecurangan. Baik dalam menyukai dan manggantang ataupun didalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakan. Mereka mempunyai dua macam sukat dan gantang ataupun anak timbangan; sukat dan timbangan pembeli lain dengan timbangan penjual. Itulah orang-orang yang celaka: “Celakalah atas orang-orang yang curang itu.”

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan lebih dan bertentangan dengan aturan tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan termasuk kedalam golongan orang-orang yang celaka. Begitupun dengan pengelolaan keuangan dalam suatu

instansi pemerintahan, demi untuk mendapatkan laba atau profit seseorang dapat melakukan kecurangan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Tindakan yang demikian menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji sehingga menurunkan kualitasnya.

Dalam Al-qur'an Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu menegakkan kebenaran Allah dan berlaku adil dalam segala hal serta saling mengingatkan satu sama lain untuk sama-sama mencari ridho Allah. Berlaku adil sangat penting dalam melakukan kegiatan dan wewenangnya, karena adil lebih dekat dengan ketaqwaan. Selain berlaku adil, *malempu na mapaccing* juga merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan peran *Malempu na Mapaccing* sangat berpengaruh untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tanpa adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku yang bertangan kotor. Hasil wawancara dengan pak Sultan mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan peran *Malempu na Mapaccing* sangat penting karena jika tidak didasari oleh nilai tersebut maka seseorang bisa saja terjerumus untuk melakukan kecurangan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Anggaran yang dikelola sehingga seseorang bisa saja memanipulasi laporan keuangan yang dapat mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Peran Falsafah Bugis *Malempu na Mapaccing* sangat berperan terhadap pencegahan tindak kecurangan atau manipulasi yang terkadang dilakukan oleh para aparat desa seperti yang marak terjadi pada saat ini, dimana beberapa kepala desa ditangkap oleh BPK akibat tindak kecurangan yang dilakukan dalam mengelola keuangan desa yang telah merugikan



Negara dan masyarakat banyak. Hal tersebut juga dilakukan akibat kurangnya kepedulian sesama yang membiarkan seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebagaimana dalam ungkapan pepatah Bugis mengatakan:

*“Rebba sipatokkong, mali’ siparappe, sirui menre’ tessirui’ no’, malilu sipakainge, mainge’pi mupaja”*

Terjemahnya:

Rebba tegak menegakkan, hanyut dampat mendamparkan, tarik-menarik keatas bukan tarik-menarik kebawah, khilaf ingat mengingatkan sampai sadar

Adapun penjelasan dari pepatah diatas yaitu: rebah tegak-menegakkan, ialah supaya berpijak dengan teguh dan berdiri dengan megah diatas bumi kehidupan. Hanyut dampar mendamparkan adalah tolong-menolong dari kesulitan arusnya kehidupan. Tidak ada jalan kehidupan tanpa rintangan dan persimpangan, itulah perlunya saling mengingatkan kejalan yang benar jika semuanya berpadu, menjelma gotong royong yang sempurna. Maksud dari pepatah bugis tersebut yang juga merupakan Motto dari orang terdahulu mengatakan bahwa kita juga harus saling mengingatkan dan Saling peduli satu sama lain agar kita dapat berpijak dengan teguh diatas bumi kehidupan tanpa melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan aturan di daerah kita.

. Tindak kecurangan merupakan perilaku kriminal dimana seseorang telah menyalahi aturan dan bertindak tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh negara, budaya dan syariat islam. Tindakan tersebut dilakukan akibat kurangnya kepedulian sesama untuk saling mengingatkan satu sama lain sampai sadar dimana kecurangan yang dilakukan itu tidak hanya merugikan masyarakat dan pemerintah tetapi juga dapat merugikan diri sendiri baik didunia dan di akhirat. Tindakan demikian berbeda

dengan apa yang dilakukan oleh para aparat desa Pattiro Bajo. Para aparat Desa Pattiro bajo telah mencoba melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang telah ditetapkan oleh negara berupa pengelolaan yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* maupun budaya yaitu nilai “*Malempu na Mapaccing*” sehingga kecurangan masih bisa dicegah dan diminimalisir sampai saat ini. Falsafah “*Malempu na Mapaccing*” yang dimiliki aparat desa dalam pengelolaan keuangan maka secara tidak langsung mereka telah berkrakter jujur, adil dan dapat dipercaya. Karakter-karakter tersebut juga telah ditetapkan dalam islam, sebagaimana dalam surah An-Nisa: 135, bahwa:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa/ 4:135)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai orang-orang yang beriman haruslah menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Sebagai seorang aparat desa yang mengelola keuangan haruslah memiliki karakter yang baik, jujur, adil, dan dapat dipercaya dan saling mengingatkan jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh

kerabat yang lain. Kepala Desa Pattiro Bajo dalam melakukan aktivitas dan tanggung jawabnya selalu menanamkan dalam dirinya Falsafah *malempu na mapaccing* yaitu perilaku kejujuran dan kebersihan dalam mengelola keuangan, dimana uang yang dikelola tersebut bukanlah jumlah yang sedikit dan akan berakibat fatal jika terjadi kesalahan dalam mengelolanya, sehingga desa tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang bersih dan terbebas dari kecurangan (berkualitas) yang dapat dipertanggungjawabkan pada Allah, Pemerintah maupun Budaya kita sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Aparatur Desa Pattiro Bajo menganggap bahwa Falsafah “*Malempu na Mapaccing*” merupakan suatu nilai dari Budaya kita yang sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam setiap instansi terutama instansi pemerintahan. Nilai budaya “*malempu na mapaccing*” yang telah pahami dan ditanamkan dalam diri masing-masing dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengelola keuangan Desa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan di kepada pemerintah dan Allah SWT. Teori simbolis diwujudkan secara tersirat melalui simbol dalam melakukan komunikasi dan interaksi antar sesama.
2. “*Malempu na Mapaccing*” yang berarti jujur dan bersih. *Malempu* dijadikan sebagai benteng atau pagar diri dan *Mapaccing* yang berarti bersih atau bawaan hati yang bersih juga sebagai pagar diri agar terhindar dari perbuatan tercela. *Malempu na Mapaccing* dapat mengontrol diri dalam melakukan pengelolaan keuangan, dimana dengan uang seseorang dapat menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dan memilikinya. Sehingga, Niat yang suci dan dibarengi dengan kejujuran dalam mengelola keuangan Desa dapat menghindarkan kita

dari perbuatan tercela dapat yang dapat merugikan diri sendiri baik di dunia maupun di akhirat.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan adapun implikasi penelitian yang diajukan peneliti diantaranya:

1. Pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Negara dan Budaya
2. Memberikan nilai yang lebih positif sehingga Kantor Desa Pattiro Bajo dapat menjadi Kantor yang terbebas dari masalah dan dapat menjadi acuan bagi Desa-desain lain dalam mengelola keuangan desa
3. Meningkatkan komitmen Kantor dalam usaha untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadikan Desa Pattiro Bajo sebagai Desa yang aman, tentram dan sejahtera.
4. Meningkatkan nama baik desa Pattiro Bajo di mata masyarakat, karena telah melaksanakan amanah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga perubahan dan perkembangan desa lebih unggul dibandingkan desa-desa yang lain.

### C. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, antara lain:

1. Kantor desa Pattiro Bajo diharapkan dapat meningkatkan tata cara pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun agar desa Pattiro Bajo dapat menjadi desa dengan sistem pengelolaan yang terbaik yang diakui oleh negara.
2. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait penerapan Falsafah Bugis dalam mengelola keuangan, sehingga di harapkan pada peneliti selanjutnya untuk menganalisis terkait penyusunan, penelolan dan pengalokasian keuangan desa dapat dikaji lebih luas lagi untuk menjelaskan hal yang belum dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Ahmadi, Dadi. 2005. Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. Terakreditasi Dirjen Dikti. 301-316.

Alimuddin dan Iwan Triyuwono *et al.* 2011. Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2 (1). 70-90

Ampa, A., R. 2014. Sekitar Sepuluh Kadesa yang Diduga Selewengkan Dana ADD di Kecamatan Marbo Kab. Takalar [http:// www. mediakasus. com/ 2014/ 11/ sekitar10- kades-yang- diduga- selewengkan .html](http://www.mediakasus.com/2014/11/sekitar10-kades-yang-diduga-selewengkan.html). Diakses Rabu, 12 Juli, 2017, Pukul 13.03 Wita.

Andranovich, G dan G, Riposa. 1993. Doing Urban Reaserch. *Newbury Park: Sage Publications*.

Antariksa (2009). "Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan", *Proseding Seminar Nasional*, Unmer: Malang.

Asni, F., dkk. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 village in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Bussiness and Management (IOSR-JBM)*. 10(4): 1-9.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Diputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*.: Jakarta.

Chomariyah, Nurul H, dan Bambang A. 2016. Participation Principle on The 2014 Village Law in Coastal Village. *International Journal of Bussiness, Economics and Law*. 10(4): 33-40.

Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance. [http:// papers. ssrn.com](http://papers.ssrn.com). Diakses: 23(Desember). Pukul: 20.00 Wita.

Darmawati. 2014, Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam, *Mazahib*. 13(2)

- Dewa, Aditya Putra. 2015. Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur TBK Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. 4(3).
- Efferin, S. 2015. Akuntansi, Spiritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 6(3): 341-511.
- Emirzon, Joni. 2007. Prinsip-Prinsip GCG, *Genta Press* : Jogjakarta.
- Emosda. 2011. Penanaman nilai-nilai Kejujuran dalam Menyiapkan karakter Bangsa. *Innovatio*. 10(1).
- Farihah, I. 2015. Fisafat Materialisme Karl Marx (Epistimologi *Dialectical and Historical Materialism*). *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. 3(2): 431-454.
- Firdaus. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu. *Artikel Ilmiah*. Universitas Pasir Pengaraian.
- Furqaini, A. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-anget Kabupaten Sumenep). *Tesis*. Program S2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Surabaya.
- Gobel, Surya Chandra. 2014. Fungsi dan Sistem Pengelolaan Keuangan Usaha. <http://kursusinternetmarketingjakarta.com/fungsi-dan-sistem-pengelolaan-keuangan-usaha/>. Di Akses: 12(Maret). Pukul 15.00 Wita.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. 4(8). 1-15.
- Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. *Alfabeta*. Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Exposure Draft Penyajian Laporan Keuangan Prakarsa Pengungkapan. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- . 2015. Standar Akuntansi Keuangan. *Ikatan Akuntansi Indonesia*. Jakarta. 120-121.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. Metodologo Penelitian Bisnis. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM*. Yogyakarta.



- Jalal, Raja, N., Naveeda Zeb., Hammad, A.K. dan Um-E-Roman Fayyaz. 2016. Earning Management In Term Of Islam: A Literature Analysis. *International Journal Of Management Sciencess and Business Reserch*, 5(2), 11-17.
- Kartikasari, R. N. dan Gugus Irianto. 2010. Penerapan Model Beish (1999) dan Model Altman (2000) dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 1(2).
- Khairani, Hanni. 2015. Etika Bisnis Islam Tentang Manajemen Laba. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta.
- Kila, K. K. 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrasi Negara*. 5(1): 5188-5200.
- Luhgiatno. 2008, Mencegah Tindakan Manajemen Laba Dengan Mekanisme *Coorporate Governance ( Prevent Earning Management Action With Coorporate Governance Mechanism )*. *Fokus Ekonomi*, 3(2).
- Maulana, Agus. 2014. Kecurangan (*Fraud*) Dalam Akuntansi dan Etika Profesi Akuntansi. <http://waterdoor-blanco.blogspot.co.id/2014/11/kecurangan-fraud-dalam-akuntansi-dan.html?m=1>. Diakses: 26(Januari). Pukul 10.00 WITA.
- Marzuqi, Ahmad, Yusuf dan Achmad Badaruddin Latif. 2010. Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. 7(1). 1-22.
- Mannahao, Mustari Idris. 2010. The Secret Of Siri' Na Pesse. Pustaka Refleksi. Jakarta. 1-195.
- Maslow, Abraham. 2014, *Teori Aktualisasi Diri*, Inspirasi dan motivasi.
- Minarti, Sri. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda. *Forum Ekonomi*. 15(2). 69-80.
- Mongsawad, P. 2010. Filosofi dari Kecukupan Ekonomi: Sebuah Kontribusi Teori Pembangunan. *Journal Pembangunan Asia-Pasifik*. 7(1): 1-18.
- Mulyawan, Setia. 2017. Manajemen Keuangan. Pustaka Setia. Jakarta. 1-303
- Mustam, 2012. Manajemen Laba (Earnings Management) Dalam Tinjauan Etika Islam. *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*. 01(2).
- Najmuddin dan Wiwiek.R.A. 2011. Studi Tentang Intervensi dan Peningkatan Moral Mahasiswa. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. 18(1). 69-83.

- Nana Sudjana. 2009. *Penilaian Hasil proses Belajar mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin. 2010. Kearifan Lokal Dalam *Pappaseng* Bugis (*Local Wisdom in Pappaseng Bugis*). *Sawerigading*. 16(2). 265-274.
- Nurhayati. 2015. Melukiskan Akuntansi Dengan Kuas Interpretif. *Bisnis*. 3(1)
- Obida, Siti Normala Sheikh dan Lotfi Demikha. 2011. *Earnings Management: Islamic Perspective*. *Asia Pasific Journal Of Accounting And Finance*. 2(1).
- Pakar Komunikasi. 2017. Portal Ilmu Komunikasi Indonesia. <https://pakarkomunikasi.com/teori-interaksi-simbolik>. Di Akses Selasa 13 November 2017. Pukul 12.00 Wita.
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 113. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.
- Prabawa. A. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 3(1): 227-238.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Randa, F dan Fransiskus E. D. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 5(3): 477-484.
- Rahman, F. 2011. Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*. 2(1): 13-24.
- Rahmat, S. P. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. 5(9): 1-8.
- Rizal, Syamsul. 2015. Mutiara Bugis. <http://maaffiwaku.blogspot.co.id/p/mutiara-bugis.html>, diakses: 05(November). Pukul 16.00. WITA
- Rusdi, M. I. W., dan Susanti P. 2015. Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Indigenous*. 13(2): 68-86.
- Ronaliyw. 2016. Lagi, Ada Kades Dituding Selewengkan Dana Desa <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/07/11/lagi-ada-kades-dituding-selewengkan-dana-desa/>. Diakses Rabu, 12 Juli 2017, Pukul 16.00 WITA

- Saputra, I. W. 2016. Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JIPE)*. 6(1): 1-10.
- Shaferi, Intan dan Sri Retno Handayani. 2014. Identifikasi Pengelolaan Keuangan Terhadap Peluang Usaha Online. *Universitas Jenderal Sudirman*. 846-851
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. 2011. Kajian Tentan Interaksionisme Simbolis. *Jurnal Ilmu Sosial- Fakultas Isipol UMA*. 4(2). ISSN: 2-85-0328
- Shodiq, M. J dan Y, T. Febri. 2015. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Emisi Karbon: Dasar Pengembangan Standar Akuntansi Karbon (Studi eksplorasi pada perusahaan manufaktur di BEI). *Simposium Nasional Akuntansi 1 Universitas Sumatera Utara, Medan*. 1-21.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Said, Mashadi. 2007. Kearifan Lokal Dalam Sastra Bugis Klasik. *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Arsitek dan Sastra) Auditorium Kampus Gunadarma*. Vol. 2. ISSN: 1858-2559
- Syahrul. 2011. Mappacci dan Nilai Filosofinya bagi Masyarakat Bugis-Makassar. [http://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagi-masyarakat-bugis-makassar\\_5500967da33311a872511814](http://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagi-masyarakat-bugis-makassar_5500967da33311a872511814). Diakses: 21(Februari). Pukul: 12.00 WITA.
- Tanjung, A.H. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Tunggal, Widjaja. 2011. Pengantar kecurangan Korporasi. Harvarindo: Jakarta
- Ujiyanto, M.A. dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Coorporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi X*. 1-26.
- Venus, A. 2003. "Nonverbal Expectancy Violation Theory": Esensi dan Perkembangannya. *MediaTor*. 4(2): 301-306.
- Wahyuddin. 2012. Arti Lempu na Mapaccing di Masyarakat bugis. *Catatan kota tua*. [Http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-na-mappaccing-di-masyarakat.html](http://wahyuddin-wahyuddin.blogspot.co.id/2012/08/arti-lempu-na-mappaccing-di-masyarakat.html), diakses: 26(September). Pukul: 15.15 WITA
- Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 3(2): 89-101

Widilestariningtyas, Ony dan Rahman Toni Akbar. 2014. Pengaruh Audit Internal Terhadap Resiko Fraud (Survey Pada PT. BRI di Wilayah Bandung). Jurnal Riset Akuntansi. 6(1). 19-37

Yulia. 2014. Mengelola Keuangan Bagi Wirausaha Pemula. Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies. 4(1). 11-27.





## Hasil Wawancara

**Narasumber** : Muhammad Akil, A.md

**Jabatan** : Kepala Desa

**Tanggal** : 28 September 2017- 30 September 2017

1. Bagaimana bapak/ibu memaknai profesi bapak/ibu ?
  - Profesi ini merupakan suatu kewajiban, dimana masyarakat telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kita sebagai wakil pemerintah dalam membangun desa agar semakin berkembang. Sehingga amanah tersebut harus kita jalankan dengan baik dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat dengan sebaik mungkin dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap desa Pattiro bajo.
2. Adakah kesulitan-kesulitan yang bapak alami semenjak menjabat sebagai kepala Desa?
  - Kesulitan-kesulitan yang dialami itu banyak, terkait keuangan karena Desa pattiro Bajo tidak memiliki pendapatan dari Desa sendiri jadi hanya mengharap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat karena pemasukan Desa hanya bersumber dari pemerintah pusat. Sehingga kita tidak hanya melakukan perubahan sesuai dengan dana yang kita miliki.
3. Bagaimana cara bapak mengalokasikan dana yang telah diterima oleh pemerintah agar sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah?

- Anggaran yang diterima oleh pemerintah langsung ditransfer oleh Menteri Desa tanpa melalui perantara dan dalam pengelolaannya harus dilakukan secara transparan mengingat jumlah Anggaran yang diterima tidak sedikit. Sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan BPD untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya, jadi setiap perubahan yang dilakukan berdasarkan dari permintaan masyarakat sehingga masyarakat tidak akan ada yang keberatan dengan apa yang kami lakukan
4. Apakah kantor ini menjunjung tinggi integritas, nilai etika dan budaya terdahulu dalam menyajikan suatu informasi terkait pengelolaan keuangan desa?
- Ya, kantor ini sangat menjunjung tinggi Integritas dan etika terlebih lagi budaya yaitu “*malempu na mapaccing*” karena budaya tersebut dapat meningkatkan iman dan ketakwaan seseorang. Menjadikan iman sebagai pondasi yang kokoh dalam melakukan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, selain dari itu setiap pengelolaan yang kita lakukan senantiasa kita selalu mengingat kepada Allah bahwa pengelolaan tersebut harus disajikan secara jujur dan bersih dan tidak boleh melakukan kecurangan walau sedikitpun.
5. Bagaimana cara bapak mewujudkan nilai “*Malempu na Mapaccing*” dalam kehidupan sehari-hari terlebih dalam melakukan pengelolaan keuangan?

- Cara bapak mengaplikasikan nilai “*malempu na mapaccing*” dalam mengelola keuangan yaitu: mencatat dan mengelola keuangan desa secara transparan. Setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk pembangunan desa terlebih dahulu dimusyawarahkan sehingga masyarakat dapat mengetahui besarnya dana yang dikeluarkan oleh aparat dalam melakukan perubahan terhadap desa. Setelah itu, pengeluaran yang telah dicatat kemudian dimusyawarahkan kembali sekaligus memberi tahu masyarakat saldo dari anggaran desa dan besaran nilai yang telah terpakai.
6. Bagaimana cara bapak meminimalisir kesalahan hitung terhadap pencatatan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh para pegawai?
- Untuk meminimalisir kesalahan hitung yang dilakukan oleh pegawai yaitu dengan mengarahkan dan melakukan pemeriksaan setiap pegawai selesai melakukan tugasnya sebelum dikirim ke pusat.
7. Bagaimana reaksi atau tindakan yang dilakukan ketika ada seorang pegawai yang melakukan kesalahan, baik itu berupa kesalahan informasi, transaksi, atau pencatatan?
- Memberi sanksi terhadap pegawai agar tidak melakukan lagi kejadian serupa, selain dari itu melakukan pemeriksaan secara teliti, cermat dan berulang-ulang terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh karyawan agar tidak terdapat kesalahan ataupun salah saji sebelum diserahkan kepada pemerintah pusat.
8. Bagaimana bapak/ibu memaknai kebiasaan dan budaya ?



- Budaya merupakan warisan orang terdahulu dimana warisan tersebut harus kita jaga dan jika perlu kita harus mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari.

9. Apa yang bapak ketahui tentang pepatah *malempu na mapaccing*?

- *Malempu na mapaccing* merupakan warisan dari leluhur yang sampai sekarang masih sering diaplikasikan oleh masyarakat bugis. *Malempu na mapaccing* sering dilakukan pada acara pernikahan yaitu mappacci untuk membuktikan bahwa sebelum melakukan ikatan perkawinan kedua mempelai harus berperilaku jujur dan bersih dalam segala hal agar rumah tangga mereka dapat bertahan selamanya. *Malempu na mapaccing* tidak hanya diaplikasikan dalam acara perkawinan tapi lebih tepat ketika budaya tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, budaya tersebut sangat penting untuk meminimalisir kecurangan seperti yang marak terjadi saat ini.

10. Menurut bapak/ibu, apakah konsep *malempu na mapaccing* sebagai salah satu konsep bugis dapat diinternalisasi dalam pengelolaan keuangan saat ini?

- Iya, *Malempu na mapaccing* dapat diinternalisasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga orang akan takut untuk melakukan tindak kecurangan maupun kesalahan hitung yang disengaja oleh para pegawai.



## Hasil Wawancara

**Narasumber** : Fenal Arisndi, S. Pd

**Jabatan** : Pendamping Desa

**Tanggal** : 28 September 2017- 30 September 2017

1. Bagaimana bapak/ibu memaknai profesi bapak/ibu ?
  - Profesi ini merupakan suatu kewajiban yang harus saya jalankan dengan sebaik mungkin, dimana setiap saat saya selalu bersama bapak kepala desa sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan senantiasa memberi nasihat dan bantuan kepada bapak kepala desa ketika sedang dalam kesulitan. Sehingga setiap tindakan yang berupa amanah oleh masyarakat tersebut harus kita jalankan dengan sebaik mungkin untuk melakukan suatu perubahan terhadap Desa Pattiwo Bajo ini.
2. Menurut bapak bagaimana seharusnya cara mengelola keuangan agar tidak bertentangan dengan aturan yang telah berlaku?
  - Dalam pengelolaan keuangan diperlukan iman yang kuat atau implementasi suatu nilai Budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, selain dari mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena aturan tidak menjamin kebersihan pengelolaan keuangan dan keandalan laporan keuangan kecuali kita sendiri yang mengontrol diri kita
3. Apakah yang bapak ketahui tentang budaya *malempu na mapaccing*?

➤ *Malempu na mapaccing* merupakan warisan dari leluhur yang memiliki arti Jujur dan bawaan hati yang bersih untuk menghasilkan sesuatu yang baik juga. Warisan tersebut harus dijaga dan dibudayakan hingga saat ini, terlebih lagi budaya tersebut memiliki dampak positif apabila diaplikasikan dalam diri sendiri dalam melakukan aktivitas setiap hari.

4. Menurut pendapat bapak, apakah *malempu na mapaccing* cocok untuk diaplikasikan dalam mengelola keuangan desa?

➤ *Malempu na mapaccing* sangat cocok dan memang seharusnya diaplikasikan dan ditanamkan dalam diri seseorang sebelum melakukan tindakan terlebih jika hal yang akan kita lakukan tersebut berguna bagi kepentingan orang banyak khususnya desa Pattiro Bajo. Hal ini sangat perlu karena para aparat desa berusaha untuk memberikan pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ditugaskan untuk mensejahterakan rakyatnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Hasil Wawancara

**Narasumber** : Sultan, S, Pd.

**Jabatan** : Sekertaris Desa

**Tanggal** : 28 September 2017- 30 September 2017

1. Bagaimana cara bapak melakukan mengelola keuangan desa yang sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat ?
  - Keuangan desa (Dana Desa) merupakan amanah yang diberikan kepada aparat desa sebagai perantara untuk mengembangkan suatu desa sesuai dengan permintaan masyarakat, dimana keuangan tersebut harus dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dengan baik tanpa ada sesuatu yang disembunyikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu *Good Governance*.
2. Bagaimana cara bapak mewujudkan asas pengelolaan keuangan dalam melakukan pengelolaan keuangan?
  - Asas pengelolaan diwujudkan dengan cara mengadakan Musdes tiap 2 sampai 3 kali dalam sebulan untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan terkait rencana pembangunan. Serta memberitahu kepada masyarakat besarnya anggaran yang diterima penggunaannya seperti apa. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dana yang dimiliki dan melakukan pembangunan berdasarkan dengan permintaan dari masyarakat itu sendiri.

3. Menurut bapak, Apakah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para aparat di kantor desa ini telah sesuai dengan aturan pemerintah dan Allah SWT.

➤ Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para karyawan Desa Pattiro Bajo memang telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pengelolaan keuangan dilakukan harus berdasarkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan mencoba mengaplikasikan Nilai dari budaya kita sendiri yakni "*Malempu na Mapaccing*". Tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan otomatis akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pada tahun 2016 Inspektorat mengeluarkan opini WTP yang menandakan bahwa laporan keuangan desa Pattiro Bajo memang telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa ada penyelewengan amanah

4. Bagaimanakah alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para aparat desa pattiro bajo ?

➤ Alur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para aparat dimulai dari tahap:

**a. Perencanaan**

"Dalam tahap prosese perencanaan yang kami lakukan. Pertama, menyusun RKP dengan melibatkan para aparat, BPD dan partisipasi dari masyarakat. Penyusunan tersebut dilakukan dengan musyawarah (MUSDES) untuk membahas mengenai Anggaran Desa yang diterima dan rencana pembangunan yang akan dilakukan, kemudian disetujui dan

sepakati secara bersama, setelah semua rampung maka langkah selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disetujui dan dikelompokkan dalam komponen belanja APBDesa”

**b. Pelaksanaan**

“Pelaksanaan APBDesa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaannya oleh tingkat pengelola Desa dengan melakukan Musyawarah Desa dengan tokoh masyarakat, BPD dan aparat pemerintah. Rapat tersebut dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sebulan untuk membahas mengenai perkembangan fisik dan penggunaan dana APBDesa”

**c. Pelaporan**

Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa dibuktikan sedemikian rupa oleh bendahara desa dengan menunjukkan suatu Bukti berupa Nota pengeluaran anggaran. Pelaporan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa adanya Falsafah “*malempu na mapaccing*” yang diterapkan oleh para pengelola keuangan (Aparat Desa) untuk mewujudkan asas yang ditetapkan oleh pemerintah.

**d. Pertanggungjawaban**

“Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang penggunaan anggaran sesuai dengan yang semestinya serta mencanumkan kwitansi-kwitansi untuk memperkuat laporan tersebut”

5. Apa yang bapak ketahui tentang pepatah *malempu na mapaccing*?
- *Malempu na mapaccing* merupakan warisan dari leluhur yang sampai sekarang masih sering diaplikasikan oleh masyarakat bugis. *Malempu na mapaccing* merupakan suatu nilai dari budaya yang sangat cocok untuk diaplikasikan dalam suatu instansi. *Malempu na mapaccing* merupakan suatu nilai yang dapat dijadikan pagar diri untuk setiap orang agar terhindar segala tindakan yang tercela. budaya tersebut sangat penting untuk meminimalisir kecurangan yang setiap waktu dapat dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
6. Menurut bapak/ibu, apakah konsep *malempu na mapaccing* sebagai salah satu konsep bugis dapat diinternalisasi dalam pengelolaan keuangan saat ini?
- Iya pendapat saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak kepala desa yang mengatakan, *Malempu na mapaccing* dapat diinternalisasi dalam pengelolaan keuangan, sehingga orang akan takut untuk melakukan tindak kecurangan maupun kesalahan hitung yang disengaja oleh para pegawai.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATTIRO BAJO**

**Dan**

**KEPALA DESA PATTIRO BAJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA PATTIRO BAJO TAHUN  
ANGGARAN 2016**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pattiro Bajo Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
-Semula	Rp. 942.704.000,00
-Bertambah/Berkurang	,00
<b>-Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b><i>Rp. 942.704.000,00</i></b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
-Semula	Rp. 299.594.200,00
-Bertambah/Berkurang	Rp. 5.000.000,00
<b>-Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b><i>Rp. 294.594.200,00</i></b>
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 587.326.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39,292,800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
-Semula	Rp. 16,490,200,00
-Bertambah/Berkurang	Rp. 5,000,000,00
<b>-Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b><u><i>Rp. 21,490,200,00</i></u></b>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u><i>Rp. 942.704.000,00</i></u></b>

Surplus/Defisit	(Rp.	5.899,00)
-----------------	------	-----------

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 942.709.899,00</b>
---------------	---------------------------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
--------------------------	-----	------

b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
---------------------------	------------	-------------

Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

= = = = = = =

=====



a. POTRET/SKETSA DESA



1.	1. Batas Desa	7.	7. Puskesmas	13.	13. Kolam ikan
2.	2. Sungai	8.	8. Sawah	14.	14. Sinar
3.	3. Jalan	9.	9. Jembatan	15.	15. Kertan Kopi
4.	4. Rumah SD	10.	10. Rumah	16.	16. Orang
5.	5. Masjid	11.	11. Jalan Kandang	17.	17. Jembatan
6.	6. Gedung TK	12.	12. Jalan Desa	18.	18. Laj. Bata

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

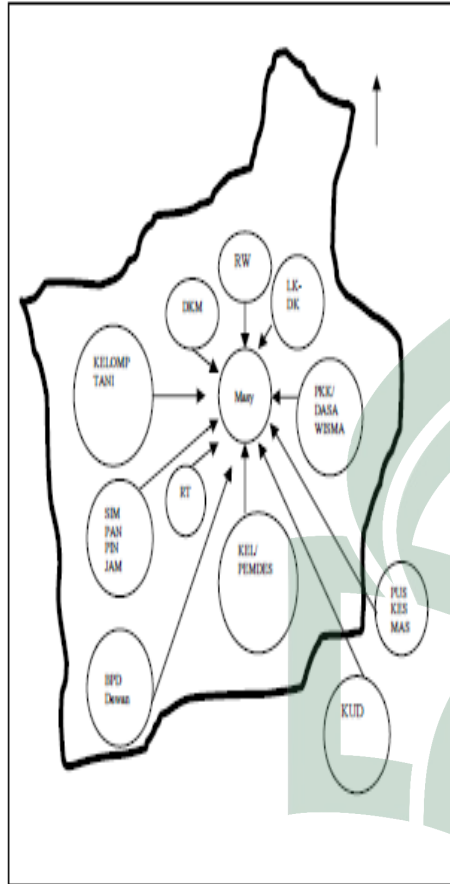
a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KESEHATAN KEBADAN	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	+	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	+	***	***	+	-	-	-	-	-
Korbanan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	+	-	-	-	-	-
Penan	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Det.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat lengkap</li> <li>- Sarana tersedia</li> </ul>
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga pengurus potensial</li> </ul>
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dambi macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga ada</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tak pernah melakukan survey dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal usaha besar</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memuaskan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada program pelatihan</li> <li>- Ada kredit bunga rendah tersedia</li> </ul>
	dst	dst	dst



Proses wawancara dengan Bapak Kepala Desa dan Pembantu Desa



Foto Bersama Kepala Desa Pattiro Bajo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR



[illegible]

**SURAT HIMBAUAN**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

01. Augustus 2018

Journal of Management Education 34(1)

Pengeluaran Keuangan  
upaya membangun ke

5. Mendukung partisipasi masyarakat dalam melakukan pengendalian dan pemantauan informasi serta keluhan yang dilaporkan pada tingkat Desa. Kegiatan ini meliputi penyediaan Dana Desa kepada Salings Desas Transmigrasi dengan mengikutsertakan Dana Desa Transmigrasi dan Salings Desas Transmigrasi.

6. Memberikan banyak surat undangan ini dan menempelkannya di tempat-tempat strategis misalnya di Kantor Desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian Bapak/Ibu Kepala Desa dalam menjalankan amanah pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa secara baik dan benar.




 Pimpinan  
 Agus Rahardjo  
 Ketua





Pembuatan dan Pengerasan Jalan raya



Pembuatan Irigasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





Pembuatan jalan alternatif para petani



Pembuatan tempat sampah dan Decker masjid



Foto Kantor Desa Pattiro Bajo







Foto Pagar Kantor Desa Pattiro Bajo



Pembangunan Ruang Kursus menjahit untuk warga desa pattiro bajo



Foto Bangunan Posyandu Desa Pattiro Bajo



Penimbunan dan pengerasan jalan





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Syafridayani** yang lebih akrab di sapa enhy. Lahir pada tanggal 05 Mei 1995 dari pasangan suami istri H. Syahar dengan Hj. Darmawati, S.Pd di sebuah desa yang bernama Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menjajaki dunia pendidikan di TK PGRI pada umur 6 tahun. Setelah usai pendidikan TK maka dilanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar di SDN 221 Pattiro Bajo selama 6 tahun. Penyusun menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2007 dengan mendapat prestasi yang baik. Pada tahun 2007-2010 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Ma'had hadits Biru Bone dan selesai tepat waktu. Pendidikan SMA juga dilanjutkan di MA Ma'had Hadits Biru Bone. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menjadi mahasiswa, untuk lebih mengembangkan ilmu dan memperluas silaturahmi, maka penulis mengikuti organisasi yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan IMAI (Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia).